



LAMPIRAN

**TABEL ANALISIS REPRESENTASI GURU DALAM PEMBERITAAN GURU HONORER PADA MEDIA DARING
MEDIAINDONESIA.COM**

TEKS BERITA 1 “GURU HONORER ANCAM MOGOK MAKAN” EDISI 18 SEPTEMBER 2018

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
1.	<p>Medan Wacana: Guru honorer akan mengadakan aksi mogok mengajar untuk melakukan perjalanan panjang (<i>long march</i>) dari Alun-Alun Lembang menuju Kantor UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lembang. Mereka akan meminta dukungan kepada UPT Dinas Pendidikan Lembang agar guru honorer ditetapkan status kepegawaiannya sebagai CPNS bersamaan dengan pengangkatan hasil seleksi CPNS.</p> <p>Pelibat Wacana: - Guru Honorer, para guru yang akan melakukan aksi mogok mengajar sebagai</p>	<p>RATUSAN guru honorer¹ Kategori II (K-2) se-Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, bakal mogok mengajar mulai hari ini. Aksi ini sebagai bentuk protes mereka terhadap peraturan Menpan-Rebiro Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penerimaan CPNS 2018 bagi Honorers K-2.</p> <p>Selain mogok mengajar, mereka² akan <i>long march</i> dari Alun-Alun Lembang menuju Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Lembang, untuk meminta dukungan secara tertulis dari Kepala UPT, PGRI, serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah</p>												<p>¹Kata ratusan guru honorer sebagai subjek mengandung unsur kategorisasi. Kategorisasi memunculkan status subjek yaitu honorer. Berdasarkan konteks, posisi guru tersebut menjadi kelompok yang tertindas melalui aksinya menentang peraturan yang berlaku. Dalam teks tersebut, guru honorer direpresentasikan sebagai kelompok yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.</p> <p>²Teks “Selain mogok mengajar, mereka² akan <i>long march</i> dari Alun-Alun Lembang menuju Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Lembang, untuk meminta dukungan secara tertulis dari Kepala UPT, PGRI, serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
	<p>wujud aspirasi mereka untuk meminta dukungan kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan.</p> <p>- Kepala UPT Dinas Pendidikan, pihak terkait yang terdiri atas Kepala UPT, PGRI, serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) sebagai orang yang dimintai dukungan oleh guru honorer.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>	(K3S).												(K3S)” mengandung unsur asimilasi . Asimilasi memunculkan subjek sebagai kelompok untuk menegaskan bahwa perjuangan dilakukan oleh banyak orang. Dalam teks tersebut, kata mereka merepresentasikan guru honorer sebagai kelompok yang menentang kebijakan karena merasa tertindas .
2.	<p>Medan Wacana: Guru honorer melakukan aksi mogok mengajar di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada Senin 17 September 2018. Aksi mogok mengajar tersebut diikuti oleh ratusan</p>	<p>“Aksi mogok mengajar hanya diikuti guru honorer dari tingkat SD, tadi yang menandatangani pernyataan ikut serta aksi berjumlah sekitar 300 guru dari 500 guru yang¹ terdaftar di kita,” kata Koordinator Forum Guru Honorer Kecamatan Lembang, Cecep</p>						√						<p>¹Teks “Aksi mogok mengajar hanya diikuti guru honorer dari tingkat SD, tadi yang menandatangani pernyataan ikut serta aksi berjumlah sekitar 300 guru dari 500 guru yang¹ terdaftar di kita,” kata Koordinator Forum Guru Honorer Kecamatan Lembang, Cecep Supriadi, Senin</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;

6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>guru honorer dari tingkat SD sebanyak 300 dari 500 guru yang telah terdaftar. Mereka meminta kebijakan pihak terkait untuk memberi kelonggaran dalam seleksi penerimaan CPNS 2018, khususnya bagi guru honorer, serta lebih transparan dalam perekrutan CPNS K-2. Hal ini dikarenakan adanya kejanggalan masa kerja yang ditemukan terhadap seorang guru honorer yang diketahui bahwa ijazah SMA guru honorer tersebut belum keluar walau masih sekolah, tetapi dapat mengikuti seleksi penerimaan CPNS tahun ini.</p> <p>Pelibat Wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru Honorer, sebagai sekelompok guru yang telah menandatangani dan sudah terdaftar untuk ikut serta melakukan aksi mogok mengajar, dan meminta kebijakan kepada 	<p>Supriadi, Senin (17/9).</p> <p>Cecep² menuntut, kebijakan dalam penerimaan CPNS 2018 bagi honorer K-2 bisa lebih dilonggarkan, tidak mesti sama dengan pelamar umum karena rata-rata honorer K-2 berusia di atas 35 tahun.</p> <p>Dia³ beserta ratusan guru honorer lainnya⁴ pun meminta pihak terkait lebih transparan dalam perekrutan CPNS K-2 sebab ditemukan seorang</p>											<p>(17/9)” mengandung unsur identifikasi. Identifikasi menerangkan jumlah subjek yaitu 300 guru honorer. Berdasarkan konteks berarti mayoritas guru honorer tersebut menyetujui aksi mogok mengajar. Dalam teks tersebut, konjungsi yang merepresentasikan guru honorer sebagai kelompok yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.</p> <p>²Kata Cecep dalam kalimat tersebut mengandung unsur individualisasi. Individualisasi memunculkan status subjek yaitu Cecep sebagai Koordinator Forum Guru Honorer. Berdasarkan konteks, posisi Cecep tersebut, direpresentasikan sebagai seorang yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.</p> <p>³Teks “Dia beserta ratusan guru honorer lainnya pun meminta pihak terkait lebih transparan dalam perekrutan CPNS K-2 sebab ditemukan seorang guru honorer K-2</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;

6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
	<p>pihak terkait agar lebih transparan dalam perekrutan CPNS K-2.</p> <p>- Cecep, sebagai orang yang bersama dengan guru honorer meminta kebijakan pihak terkait untuk memberi kelonggaran dalam seleksi penerimaan CPNS 2018, khususnya bagi guru honorer, serta lebih transparan dalam perekrutan CPNS K-2.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>	<p>guru honorer K-2 yang⁵ masa kerjanya janggal, tetapi bisa ikut serta dalam penerimaan CPNS tahun ini.</p> <p>“Enggak logis, di tahun tersebut (2005) yang bersangkutan masih sekolah, ijazah SMA-nya belum keluar, tapi sudah mendapat SK mengajar, kan aneh,” tuturnya.</p>													<p>yang masa kerjanya janggal, tetapi bisa ikut serta dalam penerimaan CPNS tahun ini” mengandung unsur individualisasi. Individualisasi menjelaskan subjek yaitu Cecep Ketua Forum Guru Honorer. Pemunculan Cecep merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru honorer.</p> <p>⁴Teks “Dia beserta ratusan guru honorer lainnya⁴ pun meminta pihak terkait lebih transparan dalam perekrutan CPNS K-2 sebab ditemukan seorang guru honorer K-2 yang masa kerjanya janggal, tetapi bisa ikut serta dalam penerimaan CPNS tahun ini.” mengandung unsur asimilasi. Teks ratusan guru honorer lainnya menjelaskan subjek dalam teks dimunculkan kelompok. Kelompok sosial yang dimaksud adalah guru honorer. Dalam kalimat tersebut seakan terjadi generalisasi bahwa yang meminta pihak terkait lebih transparan dalam perekrutan CPNS adalah ratusan guru honorer. Teks tersebut, merepresentasikan</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;

6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
															<p>guru honorer sebagai kelompok yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.</p> <p>⁵Teks “Dia beserta ratusan guru honorer lainnya pun meminta pihak terkait lebih transparan dalam perekrutan CPNS K-2 sebab ditemukan seorang guru honorer K-2 yang masa kerjanya janggal, tetapi bisa ikut serta dalam penerimaan CPNS tahun ini. Mengandung unsur identifikasi. Identifikasi menerangkan status golongan subjek secara individu dan kelompok, yaitu Cecep dan Ratusan Guru Honorer. Dalam teks tersebut, seakan menjelaskan bahwa Cecep beserta ratusan Guru Honorer lainnya tidak terima karena adanya kejanggalan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam proses perekrutan CPNS K-2. Dalam teks tersebut, konjungsi yang merepresentasikan Cecep sebagai individu yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;

6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
3.	<p>Medan Wacana: Aksi mogok mengajar akan dilaksanakan selama satu minggu. Jika adanya realisasi, aksi mogok mengajar tidak akan dilanjutkan. Aksi mogok makan tersebut berpusat di Bandung Barat. Berdasarkan pantauan Muhamad Nurdin selaku Koordinator Forum Guru Honorer Ban-dung Barat, sudah ada 10 kecamatan yang akan melakukan aksi mogok mengajar. Aksi mogok mengajar tidak akan berlanjut hingga 10 Oktober 2018, jika pada tanggal tersebut masih belum ada realisasi, maka ribuan guru honorer serempak akan mengepung kantor Pemda.</p> <p>Pelibat Wacana: - Muhamad Nurdin, sebagai Koordinator Forum Guru Honorer Bandung Barat, yang bersama guru honorer</p>	<p>Sementara itu, Koordinator Forum Guru Honorer Ban-dung Barat, Muhamad Nurdin,¹ mengatakan, mogok mengajar terkonsentrasi di setiap kecamatan di Bandung Barat. “Yang saya pantau, baru 10 kecamatan yang akan mogok dan sudah disampaikan ke UPT hingga ke bupati,” bebernya.</p> <p>Menurut rencana, aksi mogok mengajar dilaksanakan selama satu minggu. “Kalau ada realisasi, aksi tidak akan berlanjut. Tapi, misalkan, jika tidak ada realisasi, aksi bakal berlanjut hingga 10 Oktober 2018. Jika pada tanggal tersebut masih belum ada (realisasi) juga, secara serempak ribuan guru honorer se-Bandung Barat² akan mengepung kantor Pemda,” terangnya.</p>												<p>¹Teks “Forum Guru Honorer Bandung Barat, Muhamad Nurdin, mengatakan, mogok mengajar terkonsentrasi di setiap kecamatan di Bandung Barat” mengandung unsur kategorisasi. Kategorisasi memunculkan status subjek yaitu Muhamad Nurdin sebagai Koordinator Forum Guru Honorer Ban-dung Barat. Berdasarkan konteks, posisi guru tersebut menjadi kelompok yang tertindas melalui aksinya menentang peraturan yang berlaku. Dalam teks tersebut, guru honorer direpresentasikan sebagai seseorang yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.</p> <p>²Teks “ribuan guru honorer se-Bandung Barat mengandung unsur asimilasi pada kata “ribuan guru honorer” dan kategorisasi. Asimilasi memunculkan status subjek yaitu guru honorer. Berdasarkan konteks, posisi guru tersebut menjadi kelompok yang menegaskan bahwa perjuangan melalui aksinya. Kelompok tersebut kemudian</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;

6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>lain yang akan mengepung kantor Pemda, jika tidak ada realisasi selama aksi mogok mengajar berlanjut hingga 10 Oktober 2018.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>												<p>diperjelas melalui kategorisasi wilayah se-Bandung Barat. Kelompok yang dimaksud mengacu pada kelompok guru honorer di wilayah Bandung Barat untuk melakukan aksi protes mereka di Kantor Pemda. Dalam teks tersebut, guru honorer direpresentasikan sebagai kelompok yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

**TABEL ANALISIS REPRESENTASI GURU DALAM PEMBERITAAN GURU HONORER PADA MEDIA DARING
MEDIAINDONESIA.COM**

TEKS BERITA 2 “BERSATU UNTUK #2019 JADI PNS” EDISI 21 SEPTEMBER 2018

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
1.	<p>Medan Wacana: Seluruh tenaga honorer K-2 melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur pada 20 September 2018, bersamaan dengan peluncuran tagar #2019JadiPNS yang digunakan sebagai status di akun media sosial dengan tujuan untuk menuntut pemerintah mengganti status yang disandang dari honorer K-2 menjadi PNS dan menolak pembatasan umur.</p> <p>Pelibat Wacana: - Guru Honorer K-2, seluruh tenaga honorer yang menuntut</p>	<p>Unjuk rasa menolak Permenpan-Rebiro No 36 dan 37 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 meluas.</p> <p>Di Kabupaten Pamekasan, Jatim, tenaga honorer K-2 meluncurkan tagar #2019JadiPNS (#2019 Jadi PNS). Tagar itu dipakai seluruh tenaga honorer¹ untuk digunakan sebagai status di akun media sosial. Peluncuran tagar itu bersamaan dengan aksi yang mereka lakukan di Kantor Bupati Pamekasan, kemarin.</p>												<p>¹Teks “Tagar itu dipakai seluruh tenaga honorer¹ untuk digunakan sebagai status di akun media sosial" mengandung unsur asimilasi. Teks seluruh tenaga honorer menjelaskan subjek dalam teks dimunculkan kelompok. Kelompok sosial yang dimaksud adalah guru honorer. Dalam kalimat tersebut menerangkan, seluruh tenaga honorer melakukan aksi unjuk rasa dengan meluncurkan tagar #2019JadiPNS sebagai status di akun media sosial. Seakan terjadi generalisasi bahwa Teks tersebut, merepresentasikan guru honorer sebagai kelompok yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
	<p>pemerintah mengganti status honorer K-2 menjadi PNS, menolak pembatasan umur melalui status yang diluncurkan menggunakan tagar #2019JadiPNS, bersamaan dengan aksi unjuk rasa yang mereka lakukan.</p> <p>- Pemerintah, sebagai orang yang dituntut untuk mengganti status honorer K-2 menjadi PNS.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>	<p>Mereka² menuntut pemerintah mengganti status yang disandang dari honorer K-2 menjadi PNS dan menolak pembatasan umur.</p>										√		<p>²Kata mereka dalam kalimat tersebut mengandung unsur asimilasi. Asimilasi memunculkan subjek sebagai kelompok yang tidak menyetujui dan ingin menuntut Pemerintah dengan adanya batasan umur dalam persyaratan penerimaan CPNS. Dalam teks tersebut, mereka merepresentasikan guru honorer sebagai kelompok yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
2.	<p>Medan Wacana: Seluruh tenaga honorer di Kabupaten Pamekasan, Jatim secara serentak menolak adanya pembatasan umur dalam perekrutan CPNS.</p> <p>Peluncuran tagar #2019JadiPNS (#2019 Jadi PNS) sebagai status di akun media sosial menjalin komunikasi dengan tenaga honorer di Kabupaten Pamekasan, Jatim dengan tenaga honorer dari daerah lain di luar Kabupaten Pamekasan, seperti yang dirasakan Hambali beserta tenaga honorer lainnya yang merasa gelisah dengan adanya pembatasan usia maksimal 35 tahun.</p> <p>Pelibat Wacana: - Hambali, sebagai Koordinator Forum tenaga honorer K-2 yang merasa gelisah</p>	<p>"Ini bagian dari cara kami menjalin komunikasi dengan tenaga honorer dari daerah lain di luar Kabupaten Pamekasan," kata Koordinator Forum K-2, Hambali¹</p> <p>Hambali² mengatakan mereka sama-sama gelisah dengan adanya pembatasan usia maksimal 35 tahun.</p>									√		<p>¹Teks "Ini bagian dari cara kami menjalin komunikasi dengan tenaga honorer dari daerah lain di luar Kabupaten Pamekasan," kata Koordinator Forum K-2, Hambali" mengandung unsur individualisasi. Individualisasi memunculkan status subjek yaitu Hambali sebagai Koordinator Forum K-2. Berdasarkan konteks, posisi Cecep tersebut, direpresentasikan sebagai seorang yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p> <p>²Teks "Hambali² mengatakan mereka sama-sama gelisah dengan adanya pembatasan usia maksimal 35 tahun" mengandung unsur individualisasi. Individualisasi memunculkan status subjek yaitu Hambali sebagai Koordinator Forum K-2. Berdasarkan konteks, posisi Cecep tersebut, direpresentasikan sebagai seorang yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
	<p>dan menolak adanya pembatasan umur maksimal 35 tahun dalam perekrutan PNS.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>													

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
3.	<p>Medan Wacana: Banyaknya tenaga honorer K-2 di Kabupaten Pamekasan, Jatim, yang sudah mengabdikan selama puluhan tahun tidak bisa diangkat menjadi PNS hanya karena pembatasan usia yang melebihi batas maksimal.</p> <p>Pelibat Wacana: - Hambali, sebagai Koordinator Forum tenaga honorer K-2 yang bersama dengan tenaga honorer K-2 lainnya yang telah mengabdikan selama puluhan tahun agar bisa diangkat menjadi PNS.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>	<p>Banyak tenaga honorer yang¹ sudah mengabdikan puluhan tahun, sebagian besar usianya melebihi batas maksimal tersebut. Mereka masuk K-2 sejak beberapa tahun lalu dan sudah dijanjikan akan diangkat sebagai PNS.</p> <p>"Seharusnya yang menjadi patokan bukan hanya usia, tapi juga lama masa pengabdian. Sebagian tenaga K-2 ada yang sudah mengabdikan puluhan tahun dan akhirnya kandas oleh aturan itu," geram Hambali.</p>								√					<p>¹Teks Banyak tenaga honorer yang¹ sudah mengabdikan puluhan tahun, sebagian besar usianya melebihi batas maksimal tersebut” mengandung unsur identifikasi. Identifikasi memunculkan status subjek sebagai kelompok yaitu guru honorer untuk menerangkan jumlah tenaga honorer yang sudah mengabdikan selama puluhan tahun. Dalam teks tersebut, konjungsi yang merepresentasikan guru honorer sebagai korban yang tertindas kebijakan.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

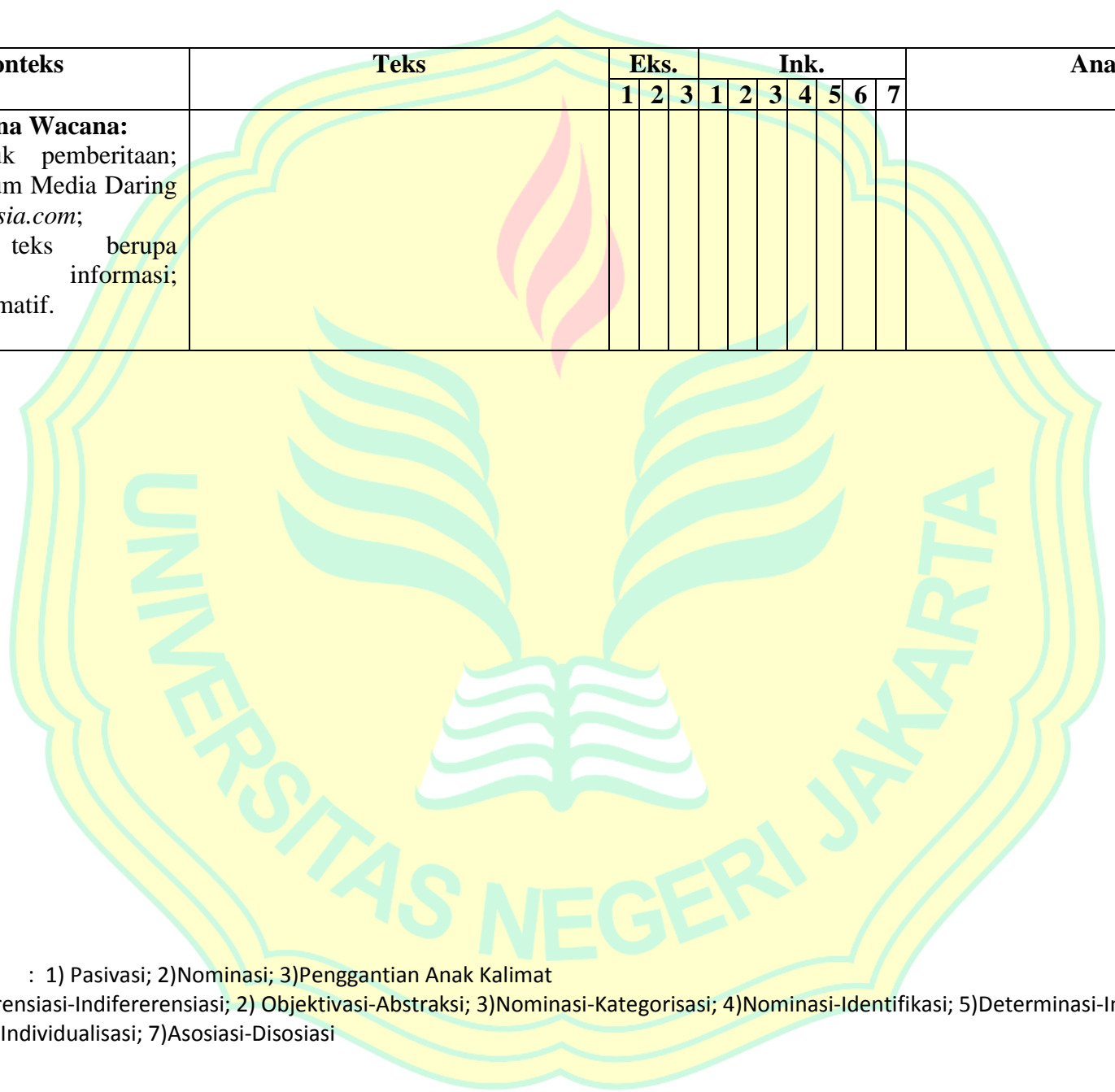
Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
4.	<p>Medan Wacana: Adanya tuntutan Honorer K-2 di Kabupaten Pamekasan, Jatim kepada Presiden Jokowi, agar mencabut Permenpan RB nomor 36 dan 37 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.</p> <p>Pelibat Wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorer K-2, sebagai sekelompok orang yang menuntut Presiden Jokowi mencabut Permenpan RB nomor 36 dan 37 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018. 	Oleh karenanya, honorer K-2 ¹ menuntut Presiden Jokowi mencabut Permenpan RB nomor 36 dan 37 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.												√	<p>¹Kata honorer K-2 dalam kalimat tersebut mengandung unsur asimilasi. Teks honorer K-2 menjelaskan subjek dalam teks dimunculkan kelompok. Kelompok sosial yang dimaksud adalah guru honorer. Berdasarkan konteks, posisi Guru Honorer tersebut, direpresentasikan sebagai kelompok yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
	Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i> ; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.													



Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;
 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
5.	<p>Medan Wacana: Sebanyak 250 guru honorer sekolah dasar se-Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar, menggelar aksi mogok mengajar di kantor UPTD Pendidikan kecamatan setempat pada Senin (24/9). Aksi mogok mengajar yang dilakukan ratusan guru honorer tersebut akan berlangsung hingga Selasa (25/9).</p> <p>Pelibat Wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guru Honorer, sekelompok guru honorer yang melakukan aksi mogok mengajar mulai Senin (24/9), hingga Selasa (25/9) di kantor UPTD Pendidikan kecamatan setempat. - Kepala UPTD kecamatan setempat, pihak terkait yang 	<p>Sekitar 250 guru honorer sekolah dasar se-Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar¹, mogok mengajar, kemarin. Rencananya aksi akan dilakukan² hingga Selasa (25/9) mendatang. Ratusan guru honorer³ tersebut berkumpul di kantor UPTD Pendidikan kecamatan setempat.</p>												<p>¹Teks “guru honorer sekolah dasar se-Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar”, mengandung unsur kategorisasi. Kategorisasi memunculkan status subjek yaitu guru honorer. Berdasarkan konteks, posisi guru tersebut menjadi kelompok yang menegaskan bahwa perjuangan melalui aksinya. Kelompok tersebut kemudian diperjelas melalui kategorisasi wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Kelompok yang dimaksud mengacu pada kelompok guru honorer di wilayah Jawa Barat untuk melakukan aksi protes mereka di Kantor Pemda. Dalam teks tersebut, kata aksi merepresentasikan sebagai kelompok yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p> <p>²Teks “Rencananya aksi akan dilakukan² hingga Selasa (25/9) mendatang. Ratusan guru honorer tersebut berkumpul di kantor UPTD Pendidikan kecamatan setempat” mengandung unsur pasivasi. Pasivasi</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
	<p>terdiri atas Kepala UPT, PGRI, serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) sebagai orang yang dimintai dukungan oleh guru honorer.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>													<p>strategi menghilangkan subjek dari teks, sebab yang menjadi fokus adalah objek dalam teks. Objek yang muncul dalam teks tersebut yaitu aksi, namun tidak ditampilkan secara jelas siapa subjek yang melakukan aksi tersebut. Dalam teks tersebut, kata aksi merepresentasikan sebagai seorang yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p> <p>³Teks “Ratusan guru honorer”³ tersebut berkumpul di kantor UPTD Pendidikan kecamatan setempat” mengandung unsur objektivasi. Objektivasi memunculkan subjek sebagai kelompok yaitu guru honorer. Dalam teks tersebut, guru honorer direpresentasikan sebagai seorang yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
6.	<p>Medan Wacana: Sekitar 250 guru honorer sekolah dasar se-Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar, akan melakukan tindak lanjut aksi serupa di Stadion Korpri, Cisaat, Rabu (19/9). Ketua Forum Komunikasi Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Gelora Samudera Kecamatan Palabuhanratu, Ichsan Hakim mengatakan aksi mogok guru honorer akan kembali dilakukan pada 25 September 2018.</p> <p>Pelibat Wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ichsan Hakim, sebagai Ketua Forum Komunikasi Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Gelora Samudera Kecamatan Palabuhanratu, yang mengatakan aksi protes guru honorer akan kembali diadakan 	<p>Ketua Forum Komunikasi Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Gelora Samudera Kecamatan Palabuhanratu, Ichsan Hakim¹ mengatakan aksi itu merupakan tindak lanjut aksi serupa di Stadion Korpri, Cisaat, Rabu (19/9). Hasil kesepakatan, mereka² akan melakukan aksi mogok hingga 25 September.</p>							√					<p>¹Teks “Ketua Forum Komunikasi Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Gelora Samudera Kecamatan Palabuhanratu, Ichsan Hakim¹ mengatakan aksi itu merupakan tindak lanjut aksi serupa di Stadion Korpri, Cisaat, Rabu (19/9). Hasil kesepakatan, mereka akan melakukan aksi mogok hingga 25 September” mengandung unsur kategorisasi. Kategorisasi memunculkan status subjek yaitu Ichsan Hakim sebagai sebagai Ketua Forum Komunikasi Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Gelora Samudera Kecamatan Palabuhanratu, Berdasarkan konteks, posisi Ichsan Hakim tersebut yaitu Ketua Forum Komunikasi Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan yang menjadi individu dalam mengoordinasikan pelaksanaan aksi protes oleh sekelompok guru honorer. Dalam teks tersebut, Ichsan Hakim direpresentasikan sebagai seorang yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
	<p>pada 25 September 2018.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>											√		<p>²Kata mereka dalam kalimat tersebut mengandung unsur asimilasi. Asimilasi memunculkan subjek sebagai kelompok yang akan melanjutkan aksi protes guru honorer pada 25 September 2018. Dalam teks tersebut, kata mereka merepresentasikan guru honorer sebagai seorang yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
7.	<p>Medan Wacana: Guru SDN Sinargalih mendesak Mendesak aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pembatasan usia CPNS diubah, untuk meminta kesejahteraan guru honorer ditingkatkan. Saepul Bayan, Ketua Komis IV DPRD Kabupaten Sukabumi berjanji akan membantu memperjuangkan hak-hak guru honorer.</p> <p>Pelibat Wacana: - Guru Honorer, sekelompok guru honorer yang mendesak aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pembatasan usia CPNS diubah," agar kesejahteraan guru honorer</p>	<p>"Kami¹ minta kesejahteraan guru honorer ditingkatkan. Mendesak aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pembatasan usia CPNS diubah," tegas guru SDN Sinargalih itu.</p> <p>Sementara itu Ketua Komis IV DPRD Kabupaten Sukabumi Saepul Bayan² berjanji membantu perjuangan hak-hak guru honorer.</p>										√	<p>¹Teks ""Kami¹ minta kesejahteraan guru honorer ditingkatkan. Mendesak aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pembatasan usia CPNS diubah," tegas guru SDN Sinargalih itu" mengandung unsur asimilasi. Asimilasi memunculkan subjek sebagai kelompok untuk menegaskan bahwa perjuangan dilakukan oleh banyak orang. Dalam teks tersebut, kata kami merepresentasikan guru honorer sebagai kelompok yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.</p> <p>²Teks Sementara itu Ketua Komis IV DPRD Kabupaten Sukabumi Saepul Bayan² berjanji membantu perjuangan hak-hak guru honorer" mengandung unsur kategorisasi. Kategorisasi memunculkan status subjek yaitu Saepul Bayan sebagai Ketua Komis IV DPRD Kabupaten</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
	<p>ditingkatkan.</p> <p>- Saepul Bayan, sebagai Ketua Komis IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang berjanji akan membantu memperjuangkan hak-hak guru honorer.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>													<p>Sukabumi. Berdasarkan konteks, posisi Saepul Bayan tersebut menjadi seseorang yang menegaskan bahwa ia berjanji akan membantu memperjuangkan hak-hak guru honorer. Subjek tersebut kemudian diperjelas melalui kategorisasi wilayah Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dalam teks tersebut, Saepul Bayan direpresentasikan merepresentasikan sebagai seorang yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
8.	<p>Medan Wacana: Terdapat lebih dari 200 guru sukarela, guru honor, Tenaga Harian Lepas (THL), honor kategori dua dan guru honor kontrak yang di wilayah Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, mengajar di berbagai sekolah dalam Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, mengeruduk DPRD setempat, pada 20 September 2018 kemarin. Ketua DPRD Yusnidarti pun menerima keluhan yang dialami guru honorer tersebut. Yusnidarti mengatakan, "Kami bersama Asosiasi DPRD(asimilasi) Indonesia sudah berjuang di pemerintah pusat agar persyaratan yang menghalangi ibu bapak dalam mengikuti seleksi penerimaan CPNS direvisi".</p> <p>Pelibat Wacana: - Guru Honorer,</p>	<p>Di Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, lebih dari 200 guru sukarela, guru honor, Tenaga Harian Lepas (THL), honor kategori dua dan guru honor kontrak yang¹ mengajar di berbagai sekolah dalam Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, mengeruduk DPRD setempat, kemarin.</p> <p>Ketua DPRD Yusnidarti yang² menerima mereka, mengatakan keluhannya sama dengan guru honorer yang ada di Indonesia. "Kami bersama Asosiasi DPRD³ Indonesia sudah berjuang di pemerintah pusat agar persyaratan yang menghalangi ibu bapak dalam mengikuti seleksi penerimaan CPNS direvisi," ujarnya.</p>							√				<p>¹Teks Di Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, lebih dari 200 guru sukarela, guru honor, Tenaga Harian Lepas (THL), honor kategori dua dan guru honor kontrak yang¹ mengajar di berbagai sekolah dalam Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, mengeruduk DPRD setempat, kemarin” mengandung unsur identifikasi. Identifikasi memunculkan status subjek sebagai kelompok yaitu guru honorer untuk menerangkan jumlah tenaga honorer yang telah mengajar di berbagai sekolah dalam Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat. Dalam teks tersebut, konjungsi yang merepresentasikan guru honorer sebagai kelompok yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p> <p>²Teks “Ketua DPRD Yusnidarti yang² menerima mereka,</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

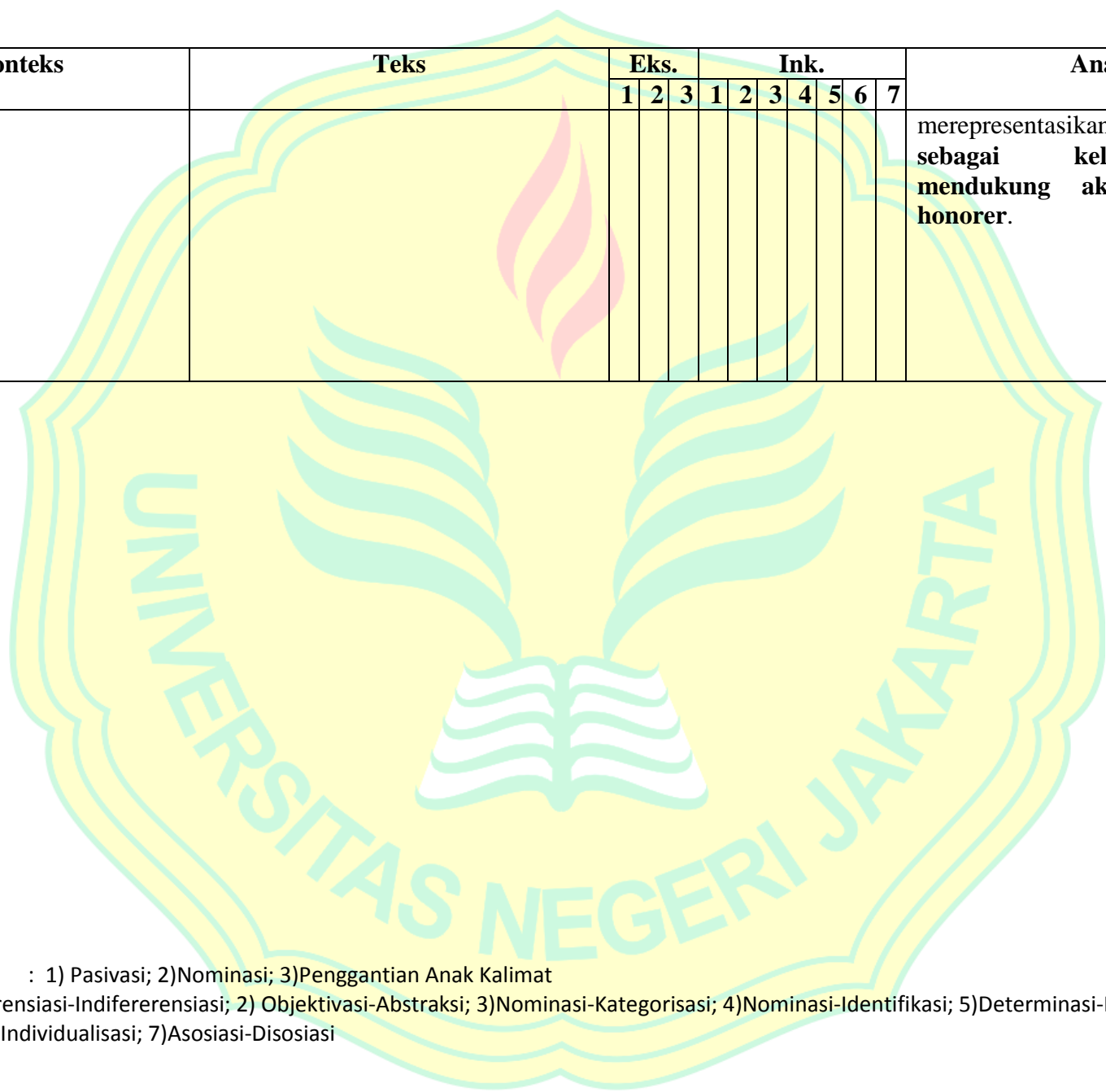
Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>sekelompok guru sukarela, guru honor, Tenaga Harian Lepas (THL), honor kategori dua dan guru honor kontrak yang mengajar di berbagai sekolah dalam Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat.</p> <p>- Yusnidarti, sebagai Ketua DPRD yang siap menerima keluhan yang dialami guru hoorer.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>												<p>mengatakan keluhannya sama dengan guru honorer yang ada di Indonesia” mengandung unsur identifikasi. Identifikasi memunculkan status subjek sebagai seseorang yaitu Yusnidarti, Ketua DPRD yang siap menerima keluhan yang dialami guru hoorer. Dalam teks tersebut, konjungsi yang merepresentasikan Yusnidarti sebagai seseorang yang mendukung aksi protes guru honorer.</p> <p>³Teks "Kami bersama Asosiasi DPRD³ Indonesia sudah berjuang di pemerintah pusat agar persyaratan yang menghalangi ibu bapak dalam mengikuti seleksi penerimaan CPNS direvisi," mengandung unsur asimilasi. Asimilasi memunculkan subjek sebagai kelompok. Kata kami dalam teks tersebut menjelaskan para pejabat tinggi DPRD bersama Asosiasi DPRD yang sudah berjuang membantu keluhan yang dialami guru honorer dalam proses pelaksanaan CPNS. Dalam teks tersebut, kata mereka</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
															merepresentasikan guru honorer sebagai kelompok yang mendukung aksi protes guru honorer.



Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
9.	<p>Medan Wacana: Adanya pembahasan yang dilakukan oleh Menpan RB bersama DPRI dan ketua umum Asosiasi DPRD Indonesia, untuk membantu kemudahan dalam proses persyaratan dalam seleksi penerimaan CPNS bagi guru honorer. Pertemuan tersebut diadakan pada 25 September 2018. Pemkab Tuban dan Gresik, Jatim, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan K2. Upaya ini dilakukan dengan memberikan tambahan insentif pada para guru dengan alokasi dana APBD setempat.</p> <p>Pelibat Wacana: - Yusnidarti, sebagai Ketua DPRD yang akan memastikan pertemuan antara Menpan RB bersama DPRI dan ketua umum Asosiasi DPRD</p>	<p>Pada 25 September mendatang akan dilakukan pembahasan oleh Menpan RB bersama DPRI dan ketua umum Asosiasi DPRD Indonesia. "Mudah-mudahan persyaratan yang menghalangi ibu bapak dalam mengikuti seleksi penerimaan CPNS bisa dihilangkan," janji Yusnidarti.</p> <p>Terkait ini, Pemkab Tuban dan Gresik, Jatim¹, berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan K2. Upaya ini dilakukan dengan memberikan tambahan insentif pada para guru dengan alokasi dana APBD setempat</p>							√						<p>¹Teks "Terkait ini, Pemkab Tuban dan Gresik, Jatim¹, berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan K2. Upaya ini dilakukan dengan memberikan tambahan insentif pada para guru dengan alokasi dana APBD setempat" mengandung unsur kategorisasi. Kategorisasi memunculkan status subjek sebagai kelompok yaitu pejabat Pemerintah dari wilayah Tuban, Gresik dan Jatim yang berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan K2. Pemunculan Pemkab tersebut, merepresentasikan sebagai kelompok yang mendukung aksi protes guru honorer.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>Indonesia pada 25 September 2018 mendatang.</p> <p>- Pemkab Tuban, sebagai pejabat Pemerintah dari wilayah Tuban, Gresik dan Jatim yang berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan K2. Upaya ini dilakukan dengan memberikan tambahan insentif pada para guru dengan alokasi dana APBD setempat</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>												

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

**TABEL ANALISIS REPRESENTASI GURU DALAM PEMBERITAAN GURU HONORER PADA MEDIA DARING
MEDIAINDONESIA.COM**

TEKS BERITA 3 “PEMERINTAH DIMINTA BERI KEPASTIAN KEPADA GURU HONORER” EDISI 28 SEPTEMBER 2018

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
1.	<p>Medan Wacana: Pemerintah diminta untuk memberi kepastian kepada guru honorer oleh Nihayatul Wafiroh sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR, berkat jasa dan pengabdian diri dalam mengajar murid-murid di sekolah. Peristiwa tersebut berlangsung saat wartawan mediaindonesia.com menghubungi Ninik sebutan panggilan akrab Nihayatul Wafiroh di Jakarta, pada Rabu, 28 September 2018.</p> <p>Pelibat Wacana: - Nihayatul Wafiroh, sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR yang ingin menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah agar memberi kepastian</p>	<p>WAKIL Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh¹ meminta pemerintah untuk memberi kepastian kepada guru honorer yang telah lama mengabdikan diri mengajar murid-murid di sekolah²</p> <p>"Sudah waktunya kita² memikirkan bahwa pendidikan dan kesehatan itu penting. Beri kepastian kepada para pendidik kita," kata Ninik, panggilan akrabnya, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/9).</p>						√							<p>¹Teks “WAKIL Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah untuk memberi kepastian kepada guru honorer yang telah lama mengabdikan diri mengajar murid-murid di sekolah” mengandung unsur kategorisasi. Kategorisasi memunculkan status subjek yaitu Nihayatul Wafiroh sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR. Pemunculan Nihayatul Wafiroh merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru honorer.</p> <p>²Teks WAKIL Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh¹ meminta pemerintah untuk memberi kepastian kepada guru honorer yang telah lama mengabdikan diri mengajar</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>terhadap nasib kesejahteraan guru honorer dalam pengabdianya selama mengajar murid-murid di sekolah.</p> <p>- Pemerintah, pihak terkait yang dimintai kepastian oleh Nihayatul Wafiroh (Wakil Ketua Komisi II DPR) untuk memberi kepastian nasib kesejahteraan guru honorer selama mengabdikan mengajar murid-murid di sekolah.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>												<p>murid-murid di sekolah² mengandung unsur identifikasi. Identifikasi menerangkan status golongan subjek secara individu yaitu Guru Honorer. Dalam teks tersebut, seakan menjelaskan bahwa guru honorer sebagai korban yang tertindas kebijakan.</p> <p>²Kata kita "Sudah waktunya kita memikirkan bahwa pendidikan dan kesehatan itu penting. Beri kepastian kepada para pendidik kita," kata Ninik, panggilan akrabnya, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/9)" mengandung unsur asimilasi. Asimilasi memunculkan subjek sebagai kelompok untuk menegaskan bahwa semua Pejabat Negara, terutama Pemerintah harus lebih peduli terhadap nasib kesejahteraan guru honorer yang begitu besar jasanya. Dalam teks tersebut, kata kita merepresentasikan para Pejabat Negara sebagai kelompok yang mendukung aksi protes guru honorer.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
2.	<p>Medan Wacana: Adanya pengakuan dari Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bahwa telah banyak menerima keluhan dan keresahan yang dialami para guru honorer kategori K-2 yang sebagian besar usianya melebihi pembatasan usia maksimal 35 tahun dan mereka sudah masuk golongan K-2 sejak beberapa tahun, tetapi tidak segera diangkat menjadi PNS.</p> <p>Pelibat Wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sebagai politikus-politikus dari berbagai partai yang menerima keluhan yang disampaikan oleh para guru honorer mengenai syarat ketegori penerimaan CPNS. - Guru Honorer, para guru honorer yang mengalami keluhan dan kegelisahan terhadap seleksi 	<p>Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)¹ itu mengaku banyak menerima keluhan dari para guru honorer kategori K2 dan yang sudah berusia di atas 35 tahun.</p>										√	<p>¹Teks “Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)¹ itu mengaku banyak menerima keluhan dari para guru honorer kategori K2 dan yang sudah berusia di atas 35 tahun” mengandung unsur asimilasi. Asimilasi memunculkan subjek sebagai kelompok untuk menegaskan bahwa semua Pejabat Negara, terutama Pemerintah harus lebih peduli terhadap nasib kesejahteraan guru honorer yang begitu besar jasanya. Dalam teks tersebut, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merepresentasikan para Pejabat Negara sebagai kelompok yang mendukung aksi protes guru honorer.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;

6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>- penerimaan CPNS yang tidak sesuai</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>												

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
3.	<p>Medan Wacana: Pemerintah diminta memberi kepastian kepada Guru Honorer, sudah sejauh mana Pemerintah bisa mengakomodasi guru honorer kategori K-2 yang berusia di atas 35 tahun, bahkan sudah sejauh mana perhatian Pemerintah terhadap guru honorer kategori K-2 mendapat jaminan dalam perjanjian kerja. Hal tersebut disampaikan oleh Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi II DPR.</p> <p>Pelibat Wacana: - Nihayatul Wafiroh, sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR yang ingin menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah agar memberi kepastian terhadap nasib kesejahteraan guru honorer dalam pengabdianya selama mengajar murid-murid di sekolah.</p>	<p>Karena itu, Ninik¹ mengatakan pemerintah harus bisa memberi kepastian sejauh mana bisa mengakomodasi guru honorer kategori K2 yang berusia di atas 35 tahun.</p> <p>"Kalau pun mereka akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana disampaikan pemerintah, sejauh mana mereka mendapat jaminan dalam perjanjian kerja tersebut," katanya.</p>									√		<p>¹Kata Ninik dalam teks “Karena itu, Ninik mengatakan pemerintah harus bisa memberi kepastian sejauh mana bisa mengakomodasi guru honorer kategori K2 yang berusia di atas 35 tahun” mengandung unsur individualisasi. Individualisasi memunculkan status subjek yaitu Ninik sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR. Berdasarkan konteks, posisi Ninik tersebut, direpresentasikan sebagai seorang yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;

6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>- Pemerintah, pihak terkait yang dimintai kepastian oleh Nihayatul Wafiroh (Wakil Ketua Komisi II DPR) untuk memberi kepastian nasib kesejahteraan guru honorer selama mengabdikan mengajar murid-murid di sekolah.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>												
4.	<p>Medan Wacana: Adanya harapan dari Nihayatul Wafiroh atau yang disapa Ninik sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin, agar bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih populis dan menguntungkan bagi guru</p>	<p>Ninik¹ berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih populis dan menguntungkan bagi guru honorer K2.</p>									√		<p>¹Kata Ninik dalam teks “Ninik berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafrudin bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih populis dan menguntungkan bagi guru honorer K2” mengandung unsur individualisasi. Individualisasi memunculkan status subjek yaitu Ninik sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR. Dalam teks tersebut dijelaskan bahwa, Ninik ingin kebijakan yang</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>honorar K2. Bagi tenaga honorar kategori K2 yang tidak bisa mengikuti Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 akan dialihkan ke jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin.</p> <p>Pelibat Wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nihayatul Wafiroh, sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR yang berharap agar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Syafruddin bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih populis dan menguntungkan bagi guru honorar K-2. - Syafruddin, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang 	<p>Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin² menyatakan tenaga honorar kategori K2 yang tidak bisa mengikuti Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 akan dialihkan ke jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p>											<p>dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin lebih populis dan menguntungkan bagi guru honorar K2, terutama untuk kesejahteraan para guru honorar. Berdasarkan konteks, posisi Ninik tersebut, merepresentasikan sebagai seseorang yang mendukung aksi protes guru honorar.</p> <p>²Teks “Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin² menyatakan tenaga honorar kategori K2 yang tidak bisa mengikuti Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 akan dialihkan ke jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)” mengandung unsur kategorisasi. Kategorisasi memunculkan status subjek yaitu Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan konteks, posisi Syafruddin sebagai Pejabat Negara</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>menyatakan, bahwa bagi tenaga honorer kategori K2 yang tidak bisa mengikuti Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 akan dialihkan ke jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).</p> <p>Modus/Sarana Wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif. 												<p>seolah mendukung aksi mogok guru honorer, padahal dia memberikan pilihan lain kepada guru honorer dalam rangka penolakan aksi tersebut secara halus. Perkataan Syafruddin merepresentasikan dirinya sebagai pelaku pembuat kebijakan karena lebih pro kepada Pemerintah untuk tidak mengangkat guru honorer menjadi PNS dengan cara membuat kebijakan lain.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

**TABEL ANALISIS REPRESENTASI GURU DALAM PEMBERITAAN GURU HONORER PADA MEDIA DARING
MEDIAINDONESIA.COM**

TEKS BERITA 4 “HONORER BUTUH REGULASI KEBERPIHAKAN” EDISI 01 OKTOBER 2018

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
1.	<p>Medan Wacana: Berbagai guru honorer di daerah mengalami permasalahan yang membuat sedikit peluang guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara akibat adanya regulasi dan minimnya kesejahteraan mereka, hendaknya dibuatkan kebijakan khusus yang berpihak kepada honorer oleh pemerintah pusat.</p> <p>Pelibat Wacana: - Guru Honorer, tenaga honorer yang membutuhkan kebijakan pengaturan khusus dari Pemerintah Pusat yang berpihak kepada honorer.</p>	<p>PERMASALAHAN guru honorer di berbagai daerah yang tidak bisa menangkap peluang menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena regulasi dan minimnya kesejahteraan mereka hendaknya dibuatkan kebijakan khusus yang berpihak kepada honorer oleh pemerintah pusat.</p>											

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
	<p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>													
2.	<p>Medan Wacana: Guru Honorer melakukan aksi demo di Sumatra Barat dan beberapa wilayah lainnya. Sebanyak ratusan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumbar, yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh pemprov secara proaktif melalui lobi ke pemerintah pusat.</p> <p>Pelibat Wacana: - Arkadius Datuak Intan Bano, sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat, yang menanggapi aksi demo yang dilakukan guru honorer yang berharap adanya kebijakan khusus</p>	<p>Harapan itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat Arkadius Datuak Intan Bano¹, kemarin, menanggapi berlanjutnya aksi demo guru honorer di Sumbar dan juga wilayah lainnya. Dia² menambahkan, adanya ratusan honorer yang³ berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumbar akan ditindaklanjuti oleh pemprov secara proaktif melalui lobi ke pemerintah pusat.</p>					√						<p>¹Teks “Harapan itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat Arkadius Datuak Intan Bano, kemarin, menanggapi berlanjutnya aksi demo guru honorer di Sumbar dan juga wilayah lainnya. Dia menambahkan, adanya ratusan honorer yang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumbar akan ditindaklanjuti oleh pemprov secara proaktif melalui lobi ke pemerintah pusat” mengandung unsur kategorisasi. Kategorisasi memunculkan status subjek yaitu Arkadius Datuak Intan Bano sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat. Pemunculan Arkadius Datuak Intan Bano, merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru</p>	

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;

6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>yang dibuat Pemerintah berpihak kepada guru honorer.</p> <p>- Guru Honorer, sebagai sekelompok orang yang melakukan aksi demo unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatra Barat.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>												<p>honorer.</p> <p>²Teks “Dia² menambahkan, adanya ratusan honorer yang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumbar akan ditindaklanjuti oleh pemprov secara proaktif melalui lobi ke pemerintah pusat” mengandung unsur individualisasi. Individualisasi menjelaskan subjek yaitu Arkadius Datuak Intan Bano sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat. Pemunculan Arkadius merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru honorer.</p> <p>³Teks “Dia menambahkan, adanya ratusan honorer yang³ berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumbar akan ditindaklanjuti oleh pemprov secara proaktif melalui lobi ke pemerintah pusat” mengandung unsur identifikasi. Identifikasi memunculkan status subjek sebagai kelompok yaitu ratusan guru honorer, yang akan melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumatra</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
															Barat. Dalam teks tersebut, konjungsi yang merepresentasikan guru honorer sebagai seorang yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.
3.	<p>Medan Wacana: Guru Honorer di berbagai daerah, tak kunjung menjadi ASN karena umur mereka telah melewati syarat yang ditentukan dalam penerimaan CPNS. Arkadius mengatakan, peluang guru honorer untuk menjadi PNS tidak bisa didapat, karena adanya moratorium yang terlalu lama, setidaknya mereka mendapatkan kesejahteraan. Bahkan, guru honorer tersebut ada yang telah mengabdikan puluhan tahun lamanya hingga 20 tahun. Untuk itu DPRD menginginkan pemerintah pusat membuat aturan main yang berpihak pada honorer," tegasnya.</p> <p>Pelibat Wacana: - Arkadius, sebagai Wakil</p>	Menurut Arkadius ¹ , jika peluang menjadi ASN tidak bisa didapat oleh guru honorer karena umur mereka ² telah melewati syarat yang ditentukan ataupun tidak kunjung jadi ASN karena moratorium yang terlalu lama, setidaknya mereka mendapatkan kesejahteraan. "Melihat pengabdian mereka ³ yang bertahun-tahun, bahkan ada yang hingga 20 tahun, DPRD menginginkan pemerintah pusat membuat aturan main yang berpihak pada honorer," tegasnya.										√	<p>¹Teks "Menurut Arkadius¹, jika peluang menjadi ASN tidak bisa didapat oleh guru honorer karena umur mereka telah melewati syarat yang ditentukan ataupun tidak kunjung jadi ASN karena moratorium yang terlalu lama, setidaknya mereka mendapatkan kesejahteraan" mengandung unsur individualisasi. Individualisasi menjelaskan subjek yaitu Arkadius Datuak Intan Bano sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat. Pemunculan Arkadius merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru honorer.</p> <p>²Teks "Menurut Arkadius, jika peluang menjadi ASN tidak bisa didapat oleh guru honorer karena umur mereka² telah melewati syarat yang ditentukan ataupun tidak kunjung jadi ASN karena moratorium yang</p>		

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;

6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>Ketua DPRD Sumatra Barat, yang ingin meminta kepada Pemerintah Pusat untuk membuat aturan main yang berpihak pada honorer," tegasnya.</p> <p>- Guru Honorer, tenaga guru yang tidak dapat memiliki peluang menjadi ASN, dikarenakan umur mereka yang telah melewati syarat yang ditentukan.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>												<p>terlalu lama, setidaknya mereka mendapatkan kesejahteraan” mengandung unsur asimilasi. Kata mereka dalam kalimat tersebut menjelaskan subjek dalam teks dimunculkan kelompok. Kelompok sosial yang dimaksud adalah guru honorer. Dalam kalimat tersebut menerangkan, guru honorer tak kunjung menjadi ASN, dikarenakan umur mereka yang telah melewati syarat yang telah ditentukan dalam seleksi penerimaan CPNS. Dalam teks tersebut, mereka merepresentasikan guru honorer sebagai korban yang tertindas kebijakan.</p> <p>³Teks "Melihat pengabdian mereka³ yang bertahun-tahun, bahkan ada yang hingga 20 tahun, DPRD menginginkan pemerintah pusat membuat aturan main yang berpihak pada honorer," tegasnya, mengandung unsur asimilasi. Kata mereka dalam teks tersebut menjelaskan subjek dalam teks dimunculkan kelompok. Kelompok sosial yang dimaksud</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
															adalah guru honorer. Kalimat dalam teks tersebut merangkan bahwa pengabdian guru honorer selama bertahun-tahun, bahkan hingga 20 tahun. Maka dari itulah, DPRD ingin pemerintah pusat membuat aturan main yang berpihak pada honorer. Berdasarkan konteks, posisi Guru Honorer tersebut, direpresentasikan sebagai seorang yang menentang kebijakan karena merasa tertindas.

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
4.	<p>Medan Wacana: Adanya beberapa faktor penyebab guru honorer tak kunjung diangkat atau mendapat status sebagai ASN. Faktor pertama, pernah mengikuti tes CPNS, tetapi tidak kunjung lulus. Faktor edua, diberlakukannya moratorium penerimaan CPNS, faktor ketiga, karena tidak adanya formasi atau kuota pembukaan CPNS sesuai jurusan yang diambil tenaga honorer ini pada saat kuliah. Arkadius menilai sebaiknya mempertimbangkan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.</p> <p>Pelibat Wacana: Arkadius, sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat,</p>	<p>Ditambahkan Arkadius¹, ada beberapa faktor yang membuat honorer tidak kunjung diangkat atau mendapat status sebagai ASN. Pertama, pernah mengikuti tes CPNS, tetapi tidak kunjung lulus. Kedua, diberlakukannya moratorium penerimaan CPNS.</p> <p>Berikutnya, karena tidak adanya formasi atau kuota pembukaan CPNS sesuai jurusan yang diambil tenaga honorer ini pada saat kuliah. Arkadius² menilai sebaiknya mempertimbangkan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 5</p>										√	<p>¹Teks “Ditambahkan Arkadius¹, ada beberapa faktor yang membuat honorer tidak kunjung diangkat atau mendapat status sebagai ASN. Pertama, pernah mengikuti tes CPNS, tetapi tidak kunjung lulus. Kedua, diberlakukannya moratorium penerimaan CPNS” mengandung unsur individualisasi. Individualisasi menjelaskan subjek yaitu Arkadius Datuak Intan Bano sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat. Pemunculan Arkadius merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru honorer.</p> <p>²Teks “Ditambahkan Arkadius¹, ada beberapa faktor yang membuat honorer tidak kunjung diangkat atau mendapat status sebagai ASN. Pertama, pernah mengikuti tes CPNS, tetapi tidak kunjung lulus. Kedua, diberlakukannya moratorium</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
	<p>yang menilai sebaiknya Pemerintah Pusat mempertimbangkan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.</p> <p>- Guru Honorer, tenaga guru yang tidak dapat memiliki peluang menjadi ASN, dikarenakan umur mereka yang telah melewati syarat yang ditentukan.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>	Tahun 2014 tentang ASN.												<p>penerimaan CPNS” mengandung unsur individualisasi. Individualisasi menjelaskan subjek yaitu Arkadius Datuak Intan Bano sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat. Pemunculan Arkadius merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru honorer.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
5.	<p>Medan Wacana: Sebanyak ribuan guru honorer di berbagai daerah di wilayah Priangan, masih menunggu kebijakan dari pemda dan pusat perihal pengangkatan ASN. Asep sebagai salah satu guru honorer di daerah tersebut mengungkapkan bahwa "Selama ini semua guru hanya mendapat uang setiap bulan berasal dari dana operasional sekolah (BOS). Akan tetapi, pembayaran yang diberikan belum sebanding dengan upah minimum kerja (UMK)."</p> <p>Pelibat Wacana: - Guru Honorer, sekelompok tenaga honorer yang masih menunggu kebijakan dari pemda dan pusat terkait pengangkatan calon ASN.</p>	<p>Sementara itu, ribuan guru honorer¹ di berbagai daerah di wilayah Priangan Timur menyatakan masih tetap menunggu kebijakan dari pemda dan pusat terkait pengangkatan calon ASN. "Selama ini semua guru² hanya mendapat uang setiap bulan berasal dari dana operasional sekolah (BOS). Akan tetapi, pembayaran yang diberikan belum sebanding dengan upah minimum kerja (UMK)," ujar seorang guru honorer Asep Andi Mubarak.</p>											<p>¹Teks "Sementara itu, ribuan guru honorer¹ di berbagai daerah di wilayah Priangan Timur menyatakan masih tetap menunggu kebijakan dari pemda dan pusat terkait pengangkatan calon ASN" mengandung unsur asimilasi. Kata ribuan guru honorer menjelaskan subjek dalam teks dimunculkan kelompok. Kelompok sosial yang dimaksud adalah guru honorer. Dalam kalimat tersebut menerangkan sebanyak ribuan guru honorer di wilayah Priangan Timur, menunggu kebijakan dan kepastian dari pemda dan pusat terkait pengangkatan calon ASN. Seakan terjadi generalisasi bahwa Teks tersebut, merepresentasikan guru honorer sebagai korban yang tertindas kebijakan.</p> <p>²Teks "Selama ini semua guru² hanya mendapat uang setiap bulan</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
	<p>- Asep, sebagai salah seorang guru honorer yang merasa bahwa pembayaran yang telah diterima selama ini, tidak sebanding minimum kerja (UMK).</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>													<p>berasal dari dana operasional sekolah (BOS). Akan tetapi, pembayaran yang diberikan belum sebanding dengan upah minimum kerja (UMK)," ujar seorang guru honorer Asep Andi Mubarak” mengandung unsur asimilasi. Kata semua guru menjelaskan subjek dalam teks dimunculkan kelompok. Kelompok sosial yang dimaksud adalah guru honorer. Berdasarkan konteks, posisi Guru Honorer tersebut, direpresentasikan sebagai korban yang tertindas kebijakan.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
6.	<p>Medan Wacana: Salah satu guru honorer yang berasal dari Kampung Ciawi, Desa/Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya, yang sudah 12 tahun menjadi tenaga pendidik, selama bekerja belum pernah menerima SK dari Bupati dan setiap bulannya hanya menerima honor sebesar Rp100-Rp200 ribu. Adapun Andi seorang guru honorer lainnya mengatakan, dengan adanya batasan umur 35 tahun dalam pelaksanaan ASN, membuat sebagian besar guru honorer merasa berat dan diskriminatif.</p> <p>Pelibat Wacana: - Asep, sebagai salah satu guru honorer Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat, yang sudah bekerja selama 12 tahun, tetapi belum</p>	<p>Menurut Asep¹, selama bekerja sebagai tenaga pendidik di Kampung Ciawi, Desa/Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya belum menerima SK dari Bupati dan setiap bulannya menerima honor sebesar Rp100-Rp200 ribu. "Saya sudah 12 tahun sebagai tenaga pendidik di sekolah dasar," ujarnya.</p> <p>Andi, seorang guru honorer² menambahkan adanya pelaksanaan tes ASN umum dengan batasan umur 35 tahun itu memang dirasakan oleh sebagian besar guru honorer sangat berat dan diskriminatif.</p>									√		<p>¹Teks "Menurut Asep¹, selama bekerja sebagai tenaga pendidik di Kampung Ciawi, Desa/Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya belum menerima SK dari Bupati dan setiap bulannya menerima honor sebesar Rp100-Rp200 ribu. "Saya sudah 12 tahun sebagai tenaga pendidik di sekolah dasar," mengandung unsur individualisasi. Individualisasi menjelaskan subjek yaitu Asep sebagai guru honorer 12 tahun, tetapi belum menerima SK dari Bupati dan setiap bulannya menerima honor sebesar Rp100-Rp200 ribu. Pemunculan Asep merepresentasikan sebagai seorang yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p> <p>²Teks "Andi, seorang guru honorer² menambahkan adanya pelaksanaan tes ASN umum dengan batasan umur 35 tahun itu memang dirasakan oleh sebagian besar guru honorer sangat berat dan diskriminatif" mengandung unsur kategorisasi. Kategorisasi</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;

6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>menerima SK dari Bupati dan setiap bulannya menerima honor sebesar Rp100-Rp200 ribu.</p> <p>- Andi, sebagai salah satu guru honorer yang merasa berat dan adanya diskriminatif dalam pelaksanaan tes ASN umum dengan batasan umur 35 tahun.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>												<p>memunculkan status subjek yaitu Andi sebagai salah satu guru honorer yang merasa berat dan adanya diskriminatif dalam pelaksanaan tes ASN umum dengan batasan umur 35 tahun. Pemunculan Andi merepresentasikan sebagai seorang yang menentang kebijakan kebijakan karena merasa tertindas.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

**TABEL ANALISIS REPRESENTASI GURU DALAM PEMBERITAAN GURU HONORER PADA MEDIA DARING
MEDIAINDONESIA.COM**

TEKS BERITA 5 “PIMPINAN DPD MINTA GURU HONORER BERSIKAP” EDISI 05 NOVEMBER 2018

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
1.	<p>Medan Wacana: Hingga saat ini nasib guru honorer seakan digantung dan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah. Minimnya kesejahteraan guru honorer membuat berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, belum menjawab tuntutan mereka yang mendesak agar segera diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>Pelibat Wacana: - Guru honorer, tenaga honorer yang ingin diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring</p>	Nasib guru honorer seakan digantung. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan belum menjawab tuntutan mereka ¹ agar diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).												1Kata mereka dalam kalimat tersebut mengandung unsur asimilasi. Asimilasi memunculkan subjek sebagai kelompok yang belum mendapat jawaban atas tuntutan yang mereka ajukan kepada Pemerintah agar status sosial mereka segera diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Dalam teks tersebut, mereka merepresentasikan guru honorer sebagai korban yang tertindas kebijakan.

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis		
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			
	<i>Mediaindonesia.com</i> ; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.														
2.	Medan Wacana: Adanya keterangan tertulis yang ditulis oleh Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis pada Minggu, 4 November 2018. Darmayanti meminta para guru honorer untuk segera mengambil sikap atas tuntutan yang mereka ajukan secara mendesak. Hal tersebut menyangkut nasib kesejahteraan guru honorer, yang tidak memiliki peluang untuk menjadi PNS karena adanya pembatasan umur bagi peserta calon PNS pada usia 35 tahun.	Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis¹ meminta tenaga honorer mengambil sikap. “Kita² tidak mendesak, sekarang kita serahkan ke honorer mau ambil sikap yang mana,” kata Darmayanti dalam keterangan tertulis, Minggu, 4 November 2018. Salah satunya tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (AS). Pada UU tersebut tertera aturan tentang pembatasan umur peserta calon PNS pada usia 35 tahun.					√								¹ Teks “Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis¹ meminta tenaga honorer mengambil sikap. “Kita tidak mendesak, sekarang kita serahkan ke honorer mau ambil sikap yang mana,” kata Darmayanti dalam keterangan tertulis, Minggu, 4 November 2018” mengandung unsur kategorisasi . Kategorisasi memunculkan status subjek yaitu Darmayanti Lubis sebagai Wakil Ketua DPD RI. Pemunculan Darmayanti Lubis merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru honorer .

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>Pelibat Wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darmayanti Lubis, sebagai Wakil Ketua DPD RI yang meminta guru honorer untuk mengambil sikap dan menyerahkan segala tuntutan guru honorer yang mendesak kepada mereka, guru honorer mau ambil sikap yang mana”. - Guru Honorer, tenaga honorer yang diminta Wakil Ketua DPD RI, Darmayanti Lubis untuk segera mengambil sikap atas tuntutan yang mereka ajukan secara mendesak. <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>												<p>Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis meminta tenaga honorer mengambil sikap. “Kita² tidak mendesak, sekarang kita serahkan kehonoran mau ambil sikap yang mana,” kata Darmayanti dalam keterangan tertulis, Minggu, 4 November 2018” mengandung unsur asimilasi. Kata kita dalam kalimat tersebut menjelaskan subjek dalam teks dimunculkan kelompok. Kelompok sosial yang dimaksud adalah para pejabat negara. Dalam kalimat tersebut menerangkan, pejabat negara menyerahkan sepenuhnya kepada guru honorer untuk mengambil sikap. Dalam teks tersebut, kita merepresentasikan pejabat negara sebagai kelompok yang mendukung aksi protes guru honorer.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
3.	<p>Medan Wacana: Aturan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (AS), tentang pembatasan umur peserta calon PNS pada usia 35 tahun, tidak berpihak kepada guru honorer. Meski terdapat pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K), langkah ini dinilai belum memberikan solusi atas tuntutan honorer. Darmayanti mengucapkan, “rasanya tidak masuk akal jika aturan tersebut tidak berpihak kepada guru honorer. Bahkan, tidak pantas jika guru honorer tidak kita bela. Pemerintah memberikan solusi, tetapi tidak sesuai harapan guru honorer.</p> <p>Pelibat Wacana: - Darmayanti, sebagai sebagai Wakil Ketua DPD RI yang meminta</p>	<p>Darmayanti¹ menyebut aturan tersebut tidak berpihak kepada guru honorer. Meski terdapat pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K), langkah ini dinilai belum memberikan solusi atas tuntutan honorer.</p> <p>“Kan rasanya jadi tidak masuk akal, tidak pantas jika tidak kita bela. Jadi sekarang, pemerintah memberikan beberapa solusi. Tapi itu pun lari dari harapan honorer ini,” ucapnya.</p>												<p>¹Teks “Darmayanti¹ menyebut aturan tersebut tidak berpihak kepada guru honorer. Meski terdapat pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K), langkah ini dinilai belum memberikan solusi atas tuntutan honorer” mengandung unsur individualisasi. Individualisasi menjelaskan subjek yaitu Darmayanti Lubis, sebagai Wakil Ketua DPD RI Pemunculan Darmayanti merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru honorer.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>guru honorer untuk mengambil sikap dan menyerahkan segala tuntutan guru honorer yang mendesak kepada mereka, guru honorer mau ambil sikap yang mana.</p> <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>												

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
4.	<p>Medan Wacana: Pemerintah pusat tidak peduli dengan permasalahan yang dialami guru honorer. Bahkan, Pemerintah Pusat seakan menyerahkan persoalan tersebut kepada Pemerintah Daerah. Darmayanti mengaku pesimistis atas sikap Pemerintah Pusat yang melemparkan persoalan guru honorer kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>Pelibat Wacana: - Darmayanti, sebagai sebagai Wakil Ketua DPD RI yang menilai sifat pemerintah pusat yang tidak memperhatikan nasib guru honorer. - Pemerintah Pusat, sebagai pejabat negara yang tidak peduli dengan persoalan yang dialami guru honorer.</p>	<p>Darmayanti¹ menilai pemerintah pusat lepas tangan terkait permasalahan tenaga honorer tersebut. Pemerintah pusat seakan menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah.</p> <p>“Kelihatanya, pusat mau melempar ke daerah. Karena yang menerima honorer ini juga daerah,” ujar Darmayanti yang mengaku pesimistis² masalah ini akan selesai dalam satu tahun.</p>											<p>¹Teks “Darmayanti¹ menilai pemerintah pusat lepas tangan terkait permasalahan tenaga honorer tersebut. Pemerintah pusat seakan menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah” mengandung unsur individualisasi. Individualisasi menjelaskan subjek yaitu Darmayanti Lubis, sebagai Wakil Ketua DPD RI yang terlihat kecewa dikarenakan sikap Pemerintah yang tidak peduli akan persoalan yang dialami sekelompok guru honorer yang lepas tanggung jawab dan menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah. Pemunculan Darmayanti merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru honorer.</p> <p>²Teks “Kelihatanya, pusat mau melempar ke daerah. Karena yang menerima honorer ini juga daerah,” ujar Darmayanti yang mengaku pesimistis² masalah ini akan selesai dalam satu tahun” mengandung unsur identifikasi. Identifikasi</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi;

6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis	
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7		
	<p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif..</p>								√					<p>memunculkan status subjek sebagai individu yaitu Darmayanti, melihat sikap pemerintah pusat yang tidak peduli terhadap nasib guru honorer, Darmayanti merasa pesimistis dengan masalah yang dialami guru honorer bisa selesai dalam waktu satu tahun. Dalam teks tersebut, konjungsi yang merepresentasikan Darmayanti sebagai seseorang yang mendukung aksi protes guru honorer.</p>
5.	<p>Medan Wacana: Permasalahan guru honorer membuat anggota DPR RI HR, Muhammad Syafii menilai negara tidak punya kemampuan untuk mengatasi persoalan tersebut. Seperti yang terlihat dalam Rancangan APBN 2019. Syafii juga menyesal dengan sikap pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar Rp 3 triliun ke kelurahan. Padahal regulasinya belum</p>	<p>Sementara itu, anggota DPR RI HR Muhammad Syafii¹ menambahkan, dirinya menilai negara tidak punya kemampuan mengatasi permasalahan guru honorer. Hal itu terlihat dalam Rancangan APBN 2019.</p>									√		<p>¹Teks “Sementara itu, anggota DPR RI HR Muhammad Syafii¹ menambahkan, dirinya menilai negara tidak punya kemampuan mengatasi permasalahan guru honorer. Hal itu terlihat dalam Rancangan APBN 2019” mengandung unsur kategorisasi. Kategorisasi memunculkan status subjek yaitu Muhammad Syafii sebagai anggota DPR RI HR. Pemunculan Muhammad Syafii, merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru</p>	

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

No.	Konteks	Teks	Eks.			Ink.							Analisis
			1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	
	<p>ada. Sementara jika nilai tersebut diserahkan untuk peningkatan kesejahteraan honorer sangat memungkinkan, minimal sama dengan upah minimum provinsi (UMP).</p> <p>Pelibat Wacana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muhammad Syafii, sebagai anggota DPR RI HR, yang negara tidak punya kemampuan mengatasi permasalahan guru honorer. - Pemerintah, sebagai pejabat negara mengalokasikan dana sebesar Rp 3 triliun ke kelurahan. <p>Modus/Sarana Wacana: Ditulis untuk pemberitaan; tindakan umum Media Daring <i>Mediaindonesia.com</i>; monolog; teks berupa keseluruhan informasi; bersifat informatif.</p>	<p>"Juga sangat menyesalkan, langkah pemerintah yang² mengalokasikan dana sebesar Rp 3 triliun ke kelurahan. Padahal regulasinya belum ada. Sementara jika nilai tersebut diserahkan untuk peningkatan kesejahteraan honorer sangat memungkinkan, minimal sama dengan upah minimum provinsi (UMP)," kata Syafii.</p>											<p>honor.</p> <p>²Teks "Juga sangat menyesalkan, langkah pemerintah yang² mengalokasikan dana sebesar Rp 3 triliun ke kelurahan. Padahal regulasinya belum ada. Sementara jika nilai tersebut diserahkan untuk peningkatan kesejahteraan honorer sangat memungkinkan, minimal sama dengan upah minimum provinsi (UMP)" mengandung unsur identifikasi. Identifikasi memunculkan status subjek sebagai individu yaitu pemerintah pusat, yang mengalokasikan dana sebesar Rp 3 triliun ke kelurahan. Padahal regulasinya belum ada. Dalam teks tersebut, konjungsi yang merepresentasikan seseorang yang mendukung aksi protes guru honor.</p>

Eks (Eksklusi) : 1) Pasivasi; 2)Nominasi; 3)Penggantian Anak Kalimat

Ink (Inklusi) : 1) Diferensiasi-Indiferensiasi; 2) Objektivasi-Abstraksi; 3)Nominasi-Kategorisasi; 4)Nominasi-Identifikasi; 5)Determinasi-Indeterminasi; 6)Asimilasi-Individualisasi; 7)Asosiasi-Disosiasi

Selasa 18 September 2018, 02:30 WIB

Guru Honorer Ancam Mogok Sebulan

DG/J-3 | Nusantara



ANTARA FOTO/Aheng Bustami

RATUSAN guru honorer Kategori II (K-2) se-Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, bakal mogok mengajar mulai hari ini. Aksi ini sebagai bentuk protes mereka terhadap peraturan Menpan-Rebiro Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penerimaan CPNS 2018 bagi Honorer K-2.

Selain mogok mengajar, mereka akan long march dari Alun-Alun Lembang menuju Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Lembang, untuk meminta dukungan secara tertulis dari Kepala UPT, PGRI, serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S).

Berita Terkini

Perdamaian AS-Taliban Diharapi Perdamaian di Asia Tengah

INTERNASIONAL

Perdamaian di Afghanistan, ibunya, berpeluang besar membuat kawasan Asia Tengah lebih...

Minggu 01 Maret 2020, 14:07 WIB

Waspada Gelombang Tinggi Sela

NUSANTARA

Pengamat cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Cilacap Feriharti Nugrohowati mengatakan gelombang tinggi di Samudra...

Minggu 01 Maret 2020, 14:01 WIB

69 WNI ABK Kapal Diamond Prin Dipulangkan

INTERNASIONAL

WNI ABK tersebut turun satu persatu untuk diukur suhu tubuhnya. Mereka yang suhunya lebih panas dari angka...

Minggu 01 Maret 2020, 13:52 WIB

Satpol PP-Sat Linmas se-Indonesia Pariwisata di Mataram

NUSANTARA

Lebih dari 4.000 personel Satpol PP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) hingga rangkaian...

Minggu 01 Maret 2020, 13:49 WIB

Lunasi Utang Pajak Rp3,29 Miliar Rutan Ponorogo

NUSANTARA

Utang pajak yang dibayar L ditambah biaya penagihan Rp3,9 juta mencapai lebih dari Rp3...

Minggu 01 Maret 2020, 13:45 WIB

Masyarakat Panik Virus Corona, Pabrik Masker Hegal

MEGAPOLITAN

Satu karton berisi 50 kotak yang terdiri dari 50 lembar masker. Sementara satu kotak dijual di pabrik...

Minggu 01 Maret 2020, 13:41 WIB

Evakuasi WNI dari Kapal Diamor Tiba Malam Ini

HUMANIORA

Evakuasi WNI di kapal pesiar Diamond Princes merupakan yang ke-3 yang dilakukan...

Minggu 01 Maret 2020, 13:37 WIB

KAI dan MRT Kerja Sama Penata Stasiun Terintegrasi

MEGAPOLITAN

Untuk kawasan Stasiun Sudirman, PT KAI akan melakukan penataan ulang hall keluar masuk penumpang melalui...

Minggu 01 Maret 2020, 13:24 WIB

3/1/2020

Guru Honorer Ancam Mogok Sebulan

Baca juga

by

Ombudsman Periksa Anies Pekan Depan

Pemprov Pastikan DKI Nihil Kasus Infeksi
KoronaAnak genius Jakarta buat serum, kulit 15 tahun
lebih muda
Lefery

Jalur KA Trans-Sulawesi Tuntas Akhir Tahun

[Read More](#)

"Aksi mogok mengajar hanya diikuti guru honorer dari tingkat SD, tadi yang menandatangani pernyataan ikut serta aksi berjumlah sekitar 300 guru dari 500 guru yang terdaftar di kita," kata Koordinator Forum Guru Honorer Kecamatan Lembang, Cecep Supriadi, Senin (17/9).

Cecep menuntut, kebijakan dalam penerimaan CPNS 2018 bagi honorer K-2 bisa lebih dilonggarkan, tidak mesti sama dengan pelamar umum karena rata-rata honorer K-2 berusia di atas 35 tahun. Dia beserta ratusan guru honorer lainnya pun meminta pihak terkait lebih transparan dalam perekrutan CPNS K-2 sebab ditemukan seorang guru honorer K-2 yang masa kerjanya janggal, tetapi bisa ikut serta dalam penerimaan CPNS tahun ini.

"Enggak logis, di tahun tersebut (2005) yang bersangkutan masih sekolah, ijazah SMA-nya belum keluar, tapi sudah mendapat SK mengajar, kan aneh," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Forum Guru Honorer Bandung Barat, Muhamad Nurdin, mengatakan, mogok mengajar terkonsentrasi di setiap kecamatan di Bandung Barat. "Yang saya pantau, baru 10 kecamatan yang akan mogok dan sudah disampaikan ke UPT hingga ke bupati," bebernya.

Menurut rencana, aksi mogok mengajar dilaksanakan selama satu minggu. "Kalau ada realisasi, aksi tidak akan berlanjut. Tapi, misalkan, jika tidak ada realisasi, aksi bakal berlanjut hingga 10 Oktober 2018. Jika pada tanggal tersebut masih belum ada (realisasi) juga, secara serempak ribuan guru honorer se-Bandung Barat akan mengepung kantor Pemda," terangnya. (DG/J-3)



0 Comments

Sort by **Oldest**

Add a comment...

Facebook Comments plugin

3/1/2020

Bersatu untuk #2019 Jadi PNS

Cari Berita...

Subs

MEDIA INDONESIA

Minggu, 01 Mar 2020 14:12:02 WIB | E-paper Media Indonesia Hari Ini

[HOME](#) [NEWS](#) [FOTO](#) [VIDEO](#) [WEEKEND](#) [EKONOMI](#) [INFOGRAFIS](#) [INTERNASIONAL](#) [MEGAPOLITAN](#) [NUSANTARA](#) [OLAHRAGA](#) [POLITIK DAN HUKUM](#)
[Penyanyi Iis Sugianto Akui Jual Rumah](#) • [Barty Melaju ke Semifinal Qatar Terbuka](#) • [Mahathir Bertemu Anggota Parlemen dari Bersatu](#) • [Lerai Tawuran, Kaki Kanan Seorang Pol](#)

Jumat 21 September 2018, 08:00 WIB

Bersatu untuk #2019 Jadi PNS

MOHAMMAD GHAZI | Nusantara



ANTARAFOTO/Sulias Satia Wijaya

UNJUK rasa menolak Permenpan-Rebiro No 36 dan 37 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 meluas.

Di Kabupaten Pamekasan, Jatim, tenaga honorer K-2 meluncurkan tagar #2019JadiPNS (#2019 Jadi PNS). Tagar itu dipakai seluruh tenaga honorer untuk digunakan sebagai status di akun media sosial. Peluncuran tagar itu bersamaan dengan aksi yang mereka lakukan di Kantor Bupati Pamekasan, kemarin. Mereka menuntut pemerintah mengganti status yang disandang dari honorer K-2 menjadi PNS dan menolak pembatasan umur.

"Ini bagian dari cara kami menjalin komunikasi dengan tenaga honorer dari daerah lain di luar Kabupaten Pamekasan," kata Koordinator Forum K-2, Hambali,

<https://mediaindonesia.com/read/detail/185727-bersatu-untuk-2019-jadi-pns>

Berita Terkini

Perdamaian AS-Taliban Diharapi Perdamaian di Asia Tengah

INTERNASIONAL

Perdamaian di Afghanistan, ibunya, berpeluang besar membuat kawasan Asia Tengah lebih...

Minggu 01 Maret 2020, 14:07 WIB

Waspada Gelombang Tinggi Sela

NUSANTARA

Pengamat cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Cilacap Feriharti Nugrohowati mengatakan gelombang tinggi di Samudra...

Minggu 01 Maret 2020, 14:01 WIB

69 WNI ABK Kapal Diamond Prin Dipulangkan

INTERNASIONAL

WNI ABK tersebut turun satu persatu untuk diukur suhu tubuhnya. Mereka yang suhunya lebih panas dari angka...

Minggu 01 Maret 2020, 13:52 WIB

Satpol PP-Sat Linmas se-Indonesia Parwisata di Mataram

NUSANTARA

Lebih dari 4.000 personel Satpol PP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) hingga rangkaian...

Minggu 01 Maret 2020, 13:49 WIB

Lunasi Utang Pajak Rp3,29 Miliar Rutan Ponorogo

NUSANTARA

Utang pajak yang dibayar L ditambah biaya penagihan Rp3,9 juta mencapai lebih dari Rp3...

Minggu 01 Maret 2020, 13:45 WIB

Masyarakat Panik Virus Korona, Pabrik Masker Ilegal

MEGAPOLITAN

Satu karton berisi 50 kotak yang terdiri dari 50 lembar masker. Sementara satu kotak dijual di pabrik...

Minggu 01 Maret 2020, 13:41 WIB

Evakuasi WNI dari Kapal Diamor Tiba Malam Ini

HUMANIORA

Evakuasi WNI di kapal pesiar Diamond Princes merupakan yang ke-3 yang dilakukan...

Minggu 01 Maret 2020, 13:37 WIB

KAI dan MRT Kerja Sama Penata Stasiun Terintegrasi

MEGAPOLITAN

Untuk kawasan Stasiun Sudirman, PT KAI akan melakukan penataan ulang hall keluar masuk penumpang melalui...

Minggu 01 Maret 2020, 13:24 WIB

1/3

3/1/2020

Bersatu untuk#2019 Jadi PNS

Hambali mengatakan mereka sama-sama gelisah dengan adanya pembatasan usia maksimal 35 tahun. Banyak tenaga honorer yang sudah mengabdikan puluhan tahun, sebagian besar usianya melebihi batas maksimal tersebut. Mereka masuk K-2 sejak beberapa tahun lalu dan sudah dijanjikan akan diangkat sebagai PNS.

"Seharusnya yang menjadi patokan bukan hanya usia, tapi juga lama masa pengabdian. Sebagian tenaga K-2 ada yang sudah mengabdikan puluhan tahun dan akhirnya kandas oleh aturan itu," geram Hambali.

Oleh karenanya, honorer K2 menuntut Presiden Jokowi mencabut Permenpan RB nomor 36 dan 37 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

Mogok Mengajar

Baca juga	by
Ombudsman Periksa Anies Pekan Depan	Pemprov Pastikan DKI Nihil Kasus Infeksi Korona
Jenius sembuhkan lutut istri yang osteoarthritis! Baca Flex.	Jalur KA Trans-Sulawesi Tuntas Akhir Tahun

Sekitar 250 guru honorer sekolah dasar se-Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar, mogok mengajar, kemarin. Rencananya aksi akan dilakukan hingga Selasa (25/9) mendatang. Ratusan guru honorer tersebut berkumpul di kantor UPTD Pendidikan kecamatan setempat.

Ketua Forum Komunikasi Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan Gelora Samudera Kecamatan Palabuhanratu, Ichsak Hakim, mengatakan aksi itu merupakan tindak lanjut aksi serupa di Stadion Korpri, Cisaat, Rabu (19/9). Hasil kesepakatan, mereka akan melakukan aksi mogok hingga 25 September.

"Kami minta kesejahteraan guru honorer ditingkatkan. Mendesak aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pembatasan usia CPNS diubah," tegas guru SDN Sirmagalih itu.

Sementara itu Ketua Komis IV DPRD Kabupaten Sukabumi Saepul Bayan berjanji membantu perjuangan hak-hak guru honorer.

Di Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, lebih dari 200 guru sukarela, guru honor, Tenaga Harian Lepas (THL), honor kategori dua dan guru honor kontrak yang mengajar di berbagai sekolah dalam Kabupaten Sijunjung, Sumatra Barat, mengeruduk DPRD setempat, kemarin.

Ketua DPRD Yusnidarti yang menerima mereka, mengatakan keluhannya sama dengan guru honorer yang ada di Indonesia. "Kami bersama Asosiasi DPRD Indonesia sudah berjuang di pemerintah pusat agar persyaratan yang menghalangi ibu bapak dalam mengikuti seleksi penerimaan CPNS direvisi," ujarnya.

Pada 25 September mendatang akan dilakukan pembahasan oleh Menpan RB bersama DPR dan ketua umum Asosiasi DPRD Indonesia. "Mudah-mudahan persyaratan yang menghalangi ibu bapak dalam mengikuti seleksi penerimaan CPNS bisa dihilangkan," janji Yusnidarti.

Terkait ini, Pemkab Tuban dan Gresik, Jatim, berkomitmen meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan K2. Upaya ini dilakukan dengan memberikan tambahan insentif pada para guru dengan alokasi dana APBD setempat. (BB/UL/YH/YK/N-3)



0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments plugin

Read More

3/1/2020

Pemerintah Diminta Beri Kepastian kepada Guru Honorer

Cari Berita...

Subs

MEDIA INDONESIA

Minggu, 01 Mar 2020 14:13:20 WIB | E-paper Media Indonesia Hari Ini

[HOME](#) [NEWS](#) [FOTO](#) [VIDEO](#) [WEEKEND](#) [EKONOMI](#) [INFOGRAFIS](#) [INTERNASIONAL](#) [MEGAPOLITAN](#) [NUSANTARA](#) [OLAHRAGA](#) [POLITIK DAN HUKUM](#)
[Polisi Gerebek Pabrik Pembuatan Masker Ilegal](#) • [Indonesia jadi Contoh Islam Moderat](#) • [Arief Budiman Mengaku tidak Kenal Harun Masiku](#) • [Ojek Daring Demo, Jalan Depan D](#)

Jumat 28 September 2018, 10:25 WIB

Pemerintah Diminta Beri Kepastian kepada Guru Honorer

Antara | [Emanandora](#)

ANTARA FOTO/Artan Aashori

WAKIL Ketua Komisi II DPR Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah untuk memberi kepastian kepada guru honorer yang telah lama mengabdikan diri mengajar murid-murid di sekolah.

"Sudah waktunya kita memikirkan bahwa pendidikan dan kesehatan itu penting. Beri kepastian kepada para pendidik kita," kata Ninik, panggilan akrabnya, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (28/9).

Berita Terkini

Perdamaian AS-Taliban Diharapi Perdamaian di Asia Tengah

INTERNASIONAL

Perdamaian di Afghanistan, imbuhnya, berpeluang besar membuat kawasan Asia Tengah lebih...

Minggu 01 Maret 2020, 14:07 WIB

Waspada Gelombang Tinggi Sela

NUSANTARA

Pengamat cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Cilacap Feriharti Nugrohowati mengatakan gelombang tinggi di Samudra...

Minggu 01 Maret 2020, 14:01 WIB

69 WNI ABK Kapal Diamond Prin Dipulangkan

INTERNASIONAL

WNI ABK tersebut turun satu persatu untuk diukur suhu tubuhnya. Mereka yang suhunya lebih panas dari angka...

Minggu 01 Maret 2020, 13:52 WIB

Satpol PP-Sat Linmas se-Indonesia Parwisata di Mataram

NUSANTARA

Lebih dari 4.000 personel Satpol PP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) hingga rangkaian...

Minggu 01 Maret 2020, 13:49 WIB

Lunasi Utang Pajak Rp3,29 Miliar Rutan Ponorogo

NUSANTARA

Utang pajak yang dibayar L ditambah biaya penagihan Rp3,9 juta mencapai lebih dari Rp3...

Minggu 01 Maret 2020, 13:45 WIB

Masyarakat Panik Virus Korona, Pabrik Masker Ilegal

MEGAPOLITAN

Satu karton berisi 50 kotak yang terdiri dari 50 lembar masker. Sementara satu kotak dijual di pabrik...

Minggu 01 Maret 2020, 13:41 WIB

Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Tiba Malam Ini

HUMANIORA

Evakuasi WNI di kapal pesiar Diamond Princes merupakan yang ke-3 yang dilakukan...

Minggu 01 Maret 2020, 13:37 WIB

KAI dan MRT Kerja Sama Penata Stasiun Terintegrasi

MEGAPOLITAN

Untuk kawasan Stasiun Sudirman, PT KAI akan melakukan penataan ulang hall keluar masuk penumpang melalui...

Minggu 01 Maret 2020, 13:24 WIB

3/1/2020

Pemerintah Diminta Beri Kepastian kepada Guru Honorer

Baca juga

by

Read More

Ombudsman Periksa Anies Pekan Depan

Pemprov Pastikan DKI Nihil Kasus Infeksi
KoronaSiswi genius Jakarta temukan obat bakar lemak
7kg sehari
Stei Slim

Jalur KA Trans-Sulawesi Tuntas Akhir Tahun

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengaku banyak menerima keluhan dari para guru honorer kategori K2 dan yang sudah berusia di atas 35 tahun.

Karena itu, Ninik mengatakan pemerintah harus bisa memberi kepastian sejauh mana bisa mengakomodasi guru honorer kategori K2 yang berusia di atas 35 tahun.

"Kalau pun mereka akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana disampaikan pemerintah, sejauh mana mereka mendapat jaminan dalam perjanjian kerja tersebut," katanya.

Ninik berharap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin bisa mengeluarkan kebijakan yang lebih populis dan menguntungkan bagi guru honorer K2.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin menyatakan tenaga honorer kategori K2 yang tidak bisa mengikuti Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil 2018 akan dialihkan ke jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Tenaga honorer dipersilakan untuk ikut bagi yang memenuhi syarat. Bila tidak memenuhi syarat akan ada jalannya melalui jalur PPPK. Sedang digodok Peraturan Pemerintah terkait itu," katanya. (OL-3)



TAGS: #CPNS

0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment...

Facebook Comments plugin

3/1/2020

Honoror Butuh Regulasi Keberpikahan

Cari Berita...

Subs

MEDIA INDONESIA

Minggu, 01 Mar 2020 14:14:11 WIB | E-paper Media Indonesia Hari Ini

[HOME](#) [NEWS](#) [FOTO](#) [VIDEO](#) [WEEKEND](#) [EKONOMI](#) [INFOGRAFIS](#) [INTERNASIONAL](#) [MEGAPOLITAN](#) [NUSANTARA](#) [OLAHRAGA](#) [POLITIK DAN HUKUM](#)
[Indonesia jadi Contoh Islam Moderat](#) • [Arief Budiman Mengaku tidak Kenal Haru n Masiku](#) • [Ojek Daring Demo, Jalan Depan DPR Ditutup](#) • [Penyanyi Iis Sugianto Akui Jual Rum](#)

Senin 01 Oktober 2018, 03:00 WIB

Honoror Butuh Regulasi Keberpikahan

Yose Hendra | Nusantera



ANTARA FOTO/Irfan Anshori

PERMASALAHAN guru honoror di berbagai daerah yang tidak bisa menangkap peluang menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena regulasi dan minimnya kesejahteraan mereka hendaknya dibuatkan kebijakan khusus yang berpihak kepada honoror oleh pemerintah pusat.

Harapan itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat Arkadius Datuak Intan Bano, kemarin, menanggapi berlanjutnya aksi demo guru honoror di Sumbar dan juga wilayah lainnya. Dia menambahkan, adanya ratusan honoror yang berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumbar akan ditindaklanjuti oleh pemprov secara proaktif melalui lobi ke pemerintah pusat.

Menurut Arkadius, jika peluang menjadi ASN tidak bisa didapat oleh guru honoror karena umur mereka telah melewati syarat yang ditentukan ataupun tidak kunjung jadi ASN karena moratorium yang terlalu lama, setidaknya mereka mendapatkan kesejahteraan. "Melihat pengabdian mereka yang bertahun-tahun, bahkan ada yang hingga 20 tahun, DPRD

Berita Terkini

Perdamaian AS-Taliban Diharapi Perdamaian di Asia Tengah

INTERNASIONAL

Perdamaian di Afghanistan, ibunya, berpeluang besar membuat kawasan Asia Tengah lebih...

Minggu 01 Maret 2020, 14:07 WIB

Waspada Gelombang Tinggi Sela

NUSANTARA

Pengamat cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Cilacap Feriharti Nugrohowati mengatakan gelombang tinggi di Samudra...

Minggu 01 Maret 2020, 14:01 WIB

69 WNI ABK Kapal Diamond Prin Dipulangkan

INTERNASIONAL

WNI ABK tersebut turun satu persatu untuk diukur suhu tubuhnya. Mereka yang suhunya lebih panas dari angka...

Minggu 01 Maret 2020, 13:52 WIB

Satpol PP-Sat Linmas se-Indonesia Pariwisata di Mataram

NUSANTARA

Lebih dari 4.000 personel Satpol PP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) hingga rangkaian...

Minggu 01 Maret 2020, 13:49 WIB

Lunasi Utang Pajak Rp3,29 Miliar Rutan Ponorogo

NUSANTARA

Utang pajak yang dibayar L ditambah biaya penagihan Rp3,9 juta mencapai lebih dari Rp3...

Minggu 01 Maret 2020, 13:45 WIB

Masyarakat Panik Virus Korona, Pabrik Masker Ilegal

MEGAPOLITAN

Satu karton berisi 50 kotak yang terdiri dari 50 lembar masker. Sementara satu kotak dijual di pabrik...

Minggu 01 Maret 2020, 13:41 WIB

Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Tiba Malam Ini

HUMANIORA

Evakuasi WNI di kapal pesiar Diamond Princes merupakan yang ke-3 yang dilakukan...

Minggu 01 Maret 2020, 13:37 WIB

KAI dan MRT Kerja Sama Penata Stasiun Terintegrasi

MEGAPOLITAN

Untuk kawasan Stasiun Sudirman, PT KAI akan melakukan penataan ulang hall keluar masuk penumpang melalui...

Minggu 01 Maret 2020, 13:24 WIB

3/1/2020

Honoror Butuh Regulasi Keberpikahan

menginginkan pemerintah pusat membuat aturan main yang berpihak pada honorer," tegasnya.

Ditambahkan Arkadius, ada beberapa faktor yang membuat honorer tidak kunjung diangkat atau mendapat status sebagai ASN. Pertama, pernah mengikuti tes CPNS, tetapi tidak kunjung lulus. Kedua, diberlakukannya moratorium penerimaan CPNS.

Berikutnya, karena tidak adanya formasi atau kuota pembukaan CPNS sesuai jurusan yang diambil tenaga honorer ini pada saat kuliah. Arkadius menilai sebaiknya mempertimbangkan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Baca juga	by
Ombudsman Periksa Anies Pekan Depan	Pemprov Pastikan DKI Nihil Kasus Infeksi Korona
Nyeri sendi hilang! Lutut seperti remaja 18 tahun! Bacal FlexActive	Jalur KA Trans-Sulawesi Tuntas Akhir Tahun

Sementara itu, ribuan guru honorer di berbagai daerah di wilayah Priangan Timur menyatakan masih tetap menunggu kebijakan dari pemda dan pusat terkait pengangkatan calon ASN. "Selama ini semua guru hanya mendapat uang setiap bulan berasal dari dana operasional sekolah (BOS). Akan tetapi, pembayaran yang diberikan belum sebanding dengan upah minimum kerja (UMK)," ujar seorang guru honorer Asep Andi Mubarak.

Menurut Asep, selama bekerja sebagai tenaga pendidik di Kampung Ciawi, Desa/Kecamatan Bojongsambir, Kabupaten Tasikmalaya belum menerima SK dari Bupati dan setiap bulannya menerima honor sebesar Rp100-Rp200 ribu. "Saya sudah 12 tahun sebagai tenaga pendidik di sekolah dasar," ujarnya.

Andi, seorang guru honorer, menambahkan adanya pelaksanaan tes ASN umum dengan batasan umur 35 tahun itu memang dirasakan oleh sebagian besar guru honorer sangat berat dan diskriminatif.

Kemauan politik

Dalam merespons aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh guru honorer, Pemkab Banyumas Jawa Tengah, mengakui bahwa pendapatan pegawai honorer masih jauh di bawah UMK, sekitar Rp1,5 juta. Pasalnya, kalau sesuai UMK, Pemkab harus menganggarkan Rp50 miliar, sedangkan kekuatan Pemkab Banyumas baru mencapai Rp12 miliar.

Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan bahwa honorarium yang diterima oleh pegawai guru atau honorer di Banyumas dialokasikan dari APBD kabupaten. "Kami juga terus berusaha untuk menaikkan honor secara bertahap, tetapi memang masih di bawah UMK Banyumas yang ditetapkan Rp1,5 juta lebih."

Dijelaskan Husein, pegawai honorer di Banyumas terdiri atas guru, petugas kebersihan, petugas perpustakaan, dan penjaga sekolah. Salah seorang pegawai honorer, Retno, 40, mengatakan bahwa tuntutan pegawai honorer ialah diangkat menjadi ASN bukannya kenaikan honor. "Kami hanya ingin honorer diprioritaskan jadi ASN karena masa pengabdian yang panjang," tegasnya.(AD/LD/N-1)



0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment..

Facebook Comments plugin

3/1/2020

Pimpinan DPD Minta Guru Honorer Bersikap

Cari Berita...

Subs

MEDIA INDONESIA

Minggu, 01 Mar 2020 14:14:50 WIB | E-paper Media Indonesia Hari Ini

[HOME](#) [NEWS](#) [FOTO](#) [VIDEO](#) [WEEKEND](#) [EKONOMI](#) [INFOGRAFIS](#) [INTERNASIONAL](#) [MEGAPOLITAN](#) [NUSANTARA](#) [OLAHRAGA](#) [POLITIK DAN HUKUM](#)
[Polisi Gerek Pabrik Pembuatan Masker Ilegal](#) • [Indonesia jadi Contoh Islam Moderat](#) • [Arief Budiman Mengaku tidak Kenal Harun Masiku](#) • [Ojek Daring Demo, Jalan Depan D](#)

Senin 05 November 2018, 15:18 WIB

Pimpinan DPD Minta Guru Honorer Bersikap

Anggi Tomi Martana | Politik dan Hukum



Dok. DPD

Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis (tengah)

Nasib guru honorer seakan digantung. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan belum menjawab tuntutan mereka agar diangkat sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis meminta tenaga honorer mengambil sikap. "Kita tidak mendesak, sekarang kita serahkan ke honorer mau ambil sikap yang mana," kata Darmayanti dalam keterangan tertulis, Minggu, 4 November 2018.

Salah satunya tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada UU tersebut tertera aturan tentang pembatasan umur peserta calon PNS pada usia 35 tahun.

Darmayanti menyebut aturan tersebut tidak berpihak kepada guru honorer. Meski terdapat pengangkatan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P3K), langkah ini dinilai belum memberikan solusi atas tuntutan honorer.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/195744-pimpinan-dpd-minta-guru-honorer-bersikap>

Berita Terkini

Perdamaian AS-Taliban Diharap Perdamaian di Asia Tengah

INTERNASIONAL

Perdamaian di Afghanistan, ibunya, berpeluang besar membuat kawasan Asia Tengah lebih...

Minggu 01 Maret 2020, 14:07 WIB

Waspada Gelombang Tinggi Sela

NUSANTARA

Pengamat cuaca Stasiun Meteorologi BMKG Cilacap Feriharti Nugrohowati mengatakan gelombang tinggi di Samudra...

Minggu 01 Maret 2020, 14:01 WIB

69 WNI ABK Kapal Diamond Prin Dipulangkan

INTERNASIONAL

WNI ABK tersebut turun satu persatu untuk diukur suhu tubuhnya. Mereka yang suhunya lebih panas dari angka...

Minggu 01 Maret 2020, 13:52 WIB

Satpol PP-Sat Linmas se-Indonesia Pariwisata di Mataram

NUSANTARA

Lebih dari 4.000 personel Satpol PP akan melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) hingga rangkaian...

Minggu 01 Maret 2020, 13:49 WIB

Lunasi Utang Pajak Rp3,29 Miliar Rutan Ponorogo

NUSANTARA

Utang pajak yang dibayar L ditambah biaya penagihan Rp3,9 juta mencapai lebih dari Rp3...

Minggu 01 Maret 2020, 13:45 WIB

Masyarakat Panik Virus Korona, Pabrik Masker Ilegal

MEGAPOLITAN

Satu karton berisi 50 kotak yang terdiri dari 50 lembar masker. Sementara satu kotak dijual di pabrik...

Minggu 01 Maret 2020, 13:41 WIB

Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Tiba Malam Ini

HUMANIORA

Evakuasi WNI di kapal pesiar Diamond Princes merupakan yang ke-3 yang dilakukan...

Minggu 01 Maret 2020, 13:37 WIB

KAI dan MRT Kerja Sama Penata Stasiun Terintegrasi

MEGAPOLITAN

Untuk kawasan Stasiun Sudirman, PT KAI akan melakukan penataan ulang hall keluar masuk penumpang melalui...

Minggu 01 Maret 2020, 13:24 WIB

1/3

3/1/2020

Pimpinan DPD Minta Guru Honorer Bersikap

Baca juga

by

Ombudsman Periksa Anies Pekan Depan

Pemprov Pastikan DKI Nihil Kasus Infeksi
KoronaAnak genius Jakarta buat serum, kulit 15 tahun
lebih muda
Stel Slim

Jalur KA Trans-Sulawesi Tuntas Akhir Tahun

"Kan rasanya jadi tidak masuk akal, tidak pantas jika tidak kita bela. Jadi sekarang, pemerintah memberikan beberapa solusi. Tapi itu pun lari dari harapan honorer ini," ucapnya.

Darmayanti menilai pemerintah pusat lepas tangan terkait permasalahan tenaga honorer tersebut. Pemerintah pusat seakan menyerahkan persoalan tersebut kepada pemerintah daerah.

"Kelihatannya, pusat mau melempar ke daerah. Karena yang menerima honorer ini juga daerah," ujar Darmayanti yang mengaku pesimistis masalah ini akan selesai dalam satu tahun.

Sementara itu, anggota DPR RI HR Muhammad Syafii menambahkan, dirinya menilai negara tidak punya kemampuan mengatasi permasalahan guru honorer. Hal itu terlihat dalam Rancangan APBN 2019.

"Juga sangat menyesalkan, langkah pemerintah yang mengalokasikan dana sebesar Rp 3 triliun ke kelurahan. Padahal regulasinya belum ada. Sementara jika nilai tersebut diserahkan untuk peningkatan kesejahteraan honorer sangat memungkinkan, minimal sama dengan upah minimum provinsi (UMP)," kata Syafii.



0 Comments

Sort by Oldest

Add a comment..

Facebook Comments plugin

Read More

Top Tags

#KPK #Jokowi #Anies Baswedan #Jiwa
#Virus Korona #Babel #Kenduri Kebangsa

BenihBaik.com

PMI dan BenihBaik.com Galang 1 Masker

HUMANIORA

Virus korona bisa menular antarmanusia, penularan melalui kontak langsung atau melat percikan batuk dan...

Rabu 26 Februari 2020, 15:29 WIB

Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Tipe ALL

HUMANIORA

Membantu Mella melalui BenihBaik.com artinya membantu keluarga Alberto untuk bisa bertah dari sulitnya...

Jumat 21 Februari 2020, 17:35 WIB

Bahrul Ulum dan Ayahnya Terker Bersama

HUMANIORA

Bahrul divonis kanker lidah, dan anaknya yang berumur 7 tahun divonis leukimia...

Jumat 21 Februari 2020, 14:44 WIB

Read More

Berita Populer

Gara-Gara Virus Korona, Arab S Umrh

INTERNASIONAL

Setiap tahunnya, hampir sebanyak 7 juta um muslim melakukan umrah ke Arab...

Kamis 27 Februari 2020, 07:30 WIB

Diundang DPR untuk Bahas Banjir Datang

MEGAPOLITAN

Koordinasi masing-masing pihak, baik itu pusat maupun daerah, dalam mengatasi banjir dianggap...

Rabu 26 Februari 2020, 11:01 WIB

Kapolda Papua Balik Serang Wal Nduga

POLITIK DAN HUKUM

Keberadaan personel TNI-Polri nonorganik di Nduga sebagai dampak dari insiden 2 Desember 2018 yang...

Jumat 28 Februari 2020, 09:10 WIB

Istana Tegur Komisioner KPAI Si

POLITIK DAN HUKUM

Staf Khusus Presiden Bidang Sosial Angkie Yudisita menyampaikan pimpinan lembaga negara sepatutnya lebih...

Senin 24 Februari 2020, 14:27 WIB